

**SKRIPSI**

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN ZAKAT TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI ACEH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Disusun Oleh :**

**Irham Maulana  
NIM. 180602162**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irham Maulana

NIM : 180602162

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 September 2022

Yang Menyatakan,



Irham Maulana

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pengaruh Belanja Modal dan Zakat Terhadap Produk Domestik  
Regional Bruto di Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Disusun oleh :

Irham Maulana  
NIM : 180602162

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



Hafiizh Maulana, S.P.,S.H.I.,M.E

Rina Desiana, ME

NIDN. 2006019002

NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag.  
NIP: 197103172008012007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921. 7551857. Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id). Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Irham Maulana  
NIM : 180602162  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
E-mail : [180602162@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602162@student.ar-raniry.ac.id)

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Belanja Modal dan Zakat Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, Mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fultext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 September 2022

Mengetahui

Penulis,

Irham Maulana

Pembimbing I

Hafizh Maulana.S.P.,S.H.I.,M.E  
NIDN. 2006019002

Pembimbing II

Rina Desiana,ME  
NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ArRaniry.

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid. M.A sebagai penguji 1 dan Hafidhah. S.E.. M.Si. Ak. CA sebagai penguji II. Terima kasih atas saran dan masukan nya yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Jalaluddin, ST., M.A serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda Isumuha Juned dan Ibunda Safriana Arifin. Terima kasih kepada Ayah dan Mamak atas segala doa yang menyertai penulis. Cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, serta dukungan yang sangat berpengaruh terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Untuk Dewi Darmawati dan Isra Mulya selaku saudara kandung penulis, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis.

8. Azizi Rahmatillah, Huzaimah, Sarah Ulfa, Tessana Rosalia, Mulyanti dan Farah Nadia selaku sahabat penulis sejak SMA, terima kasih atas motivasi, dukungan dan kebersamaan dikala suka dan duka yang telah kita lewati sedari SMA hingga saat ini..
9. Zahrul Fuadi, Nauval Rizki, M. Rahmatul Rizki, Salul Shafly, Muammar, Muhammad Haikal, Haidar Tsaqib, Wahyudi, selaku sahabat penulis dalam perkuliahan. terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, atas motivasi, dukungan, dan saling menyemangati sehingga kita bertahan sampai ke tahap akhir untuk meraih gelar sarjana. Semoga kesuksesan segera menghampiri kita.
10. Kepada seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah 2018 terimakasih atas dukungan dan bantuan dalam segala hal. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terlepas dari kata sempurna, tetapi penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Banda Aceh, 16 September 2022

**Irham Maulana**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	Ḍ			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haura* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة) AR-RANIRY

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :</i>	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/ :</i>	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-Madīnatul Munawwarah</i>	
<i>Ṭalḥah :</i>	طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Irham Maulana  
NIM : 180602162  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Belanja Modal dan Zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Pembimbing I : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E  
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pada dasarnya terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi produk domestik regional bruto suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor belanja modal dan zakat terhadap produk domestik regional bruto di Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam periode 2016-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan fokus objek yaitu produk domestik regional bruto di Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear berganda data panel dengan menggunakan Eviews 10. Hasil Penelitian menunjukkan Belanja Modal dan Zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Aceh. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Aceh. Sementara itu Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Aceh. Pemerintah Aceh perlu meningkatkan penerimaan Zakat dan mengarahkan Belanja Modal secara tepat sasaran.

**Kata Kunci:** *Belanja Modal, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto, Ekonomi Islam.*

## DAFTAR ISI

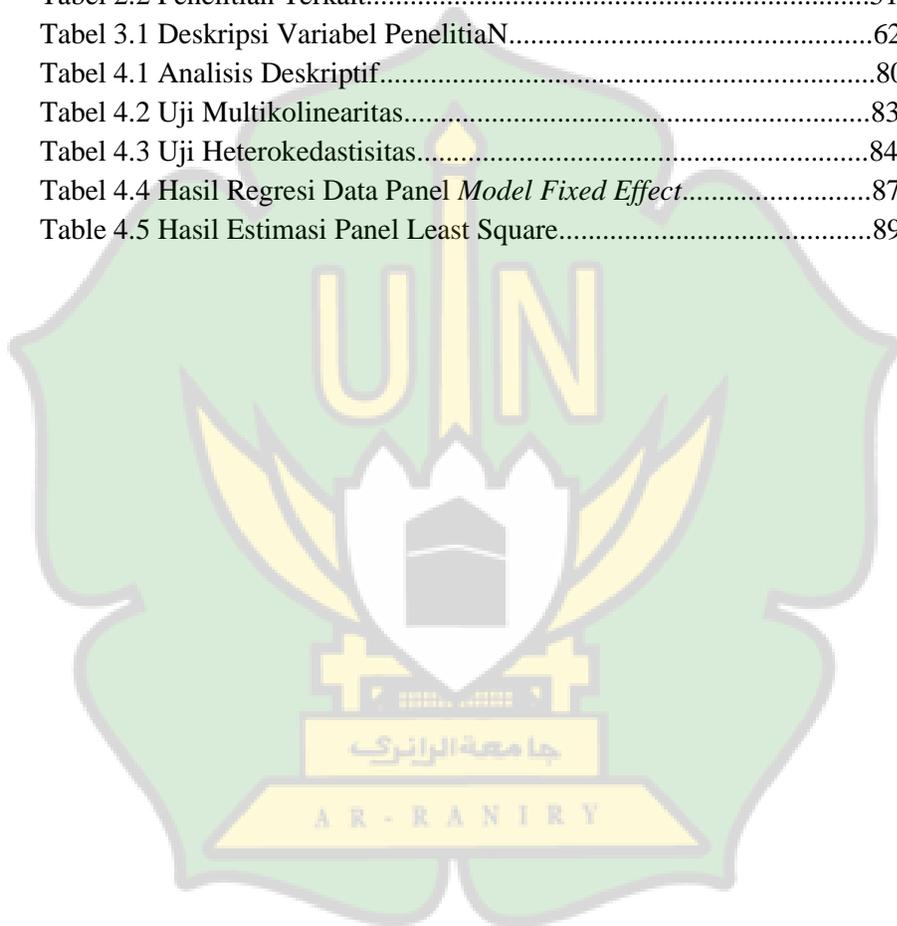
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iv
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	13
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	13
2.1.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto .....	13
2.1.2 Konsep Domestik dan Regional.....	15
2.1.3 Indikator Produk Domestik Regional Bruto.....	17
2.2 Pertumbuhan dalam Ekonomi Islam .....	20
2.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Islam.....	20
2.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Islam .....	24
2.3 Kebijakan Fiskal.....	25
2.3.1 Konsep Kebijakan Fiskal .....	25
2.3.2 Ekonomi Fiskal dalam Islam.....	29
2.4 Keuangan Publik Islam .....	32

2.5 Belanja Modal.....	34
2.5.1 Definisi Belanja Modal .....	34
2.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal.....	35
2.5.3 Peranan Belanja Modal .....	41
2.6 Zakat.....	43
2.6.1 Konsep Zakat.....	43
2.6.2 Indikator Zakat.....	45
2.6.3 Jenis-Jenis Zakat .....	46
2.7 Penelitian Terkait .....	48
2.8 Kerangka Berpikir.....	53
2.8.1 Hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB.....	53
2.8.2 Hubungan antara Zakat dengan PDRB.....	54
2.9 Hipotesis Penelitian.....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	59
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	59
3.2.1 Data Primer .....	59
3.2.2 Data Sekunder .....	60
3.3 Definisi dan Operasional Variabel .....	61
3.4 Metode Analisis.....	63
3.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
3.5.1 Common Effect (CEM) .....	64
3.5.2 Fixed Effect (FEM) .....	65
3.5.3 Random Effect (REM).....	66
3.6 Uji Spesifikasi Model.....	66
3.6.1. Uji Chow .....	66
3.6.2. Uji Hausman .....	67
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	68
3.7.1 Uji Normalitas.....	68
3.7.2 Uji Multikolinieritas .....	69
3.8 Uji Hipotesis.....	70
3.8.1 Uji Parsial (Uji T) .....	70
3.8.2 Uji Simultan (Uji F).....	71
3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	72

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	74
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	74
4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Aceh.....	75
4.1.2 Belanja Modal di Aceh.....	76
4.1.3 Zakat di Aceh.....	78
4.2 Analisis Deskriptif.....	79
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	81
4.3.1 Uji Normalitas .....	81
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	82
4.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	83
4.4 Pengujian Model .....	84
4.4.1 Uji Chow .....	85
4.4.2 Uji Hausman .....	86
4.5 Analisis Regresi Linear .....	86
4.6 Uji Signifikansi Model .....	89
4.6.1 Uji F Simultan .....	89
4.6.2 Uji T .....	90
4.6.3 Koefisien Determinasi .....	91
4.7 Pembahasan Penelitian .....	91
4.7.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam.....	92
4.7.2 Pengaruh Zakat terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam .....	94
4.7.3 Pengaruh Belanja Modal dan Zakat terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101
<b>Lampiran</b> .....	111

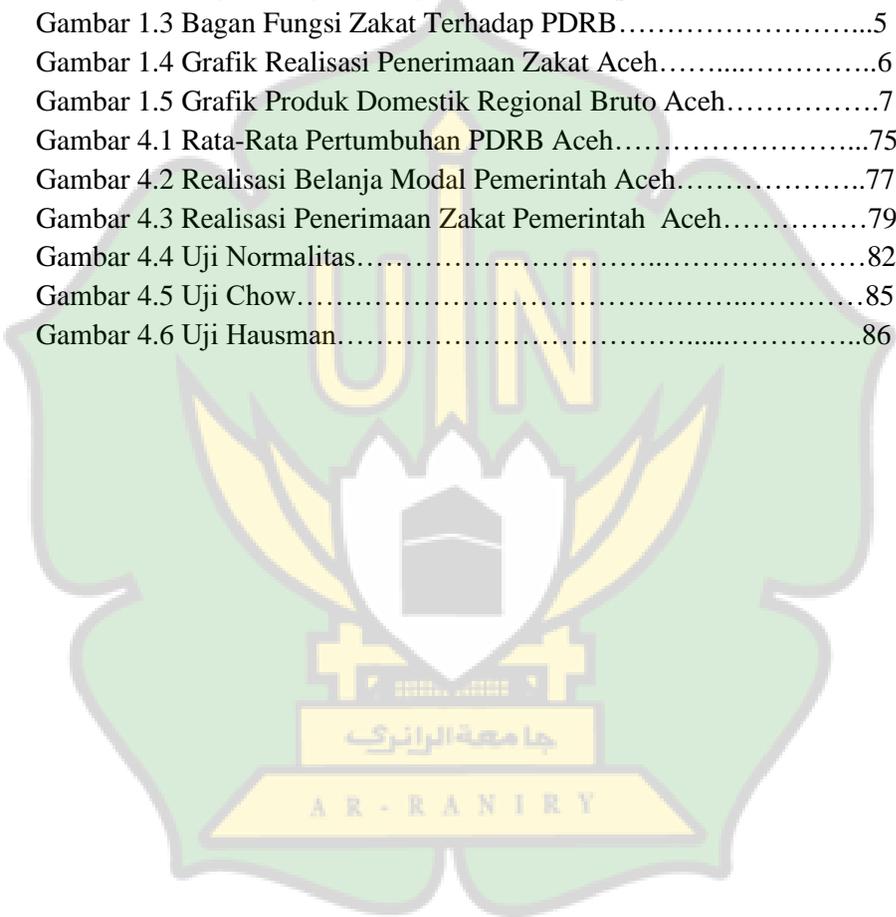
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komponen Biaya yang dalam Belanja Modal.....	37
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	51
Tabel 3.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	62
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif.....	80
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas.....	83
Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas.....	84
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel <i>Model Fixed Effect</i> .....	87
Table 4.5 Hasil Estimasi Panel Least Square.....	89



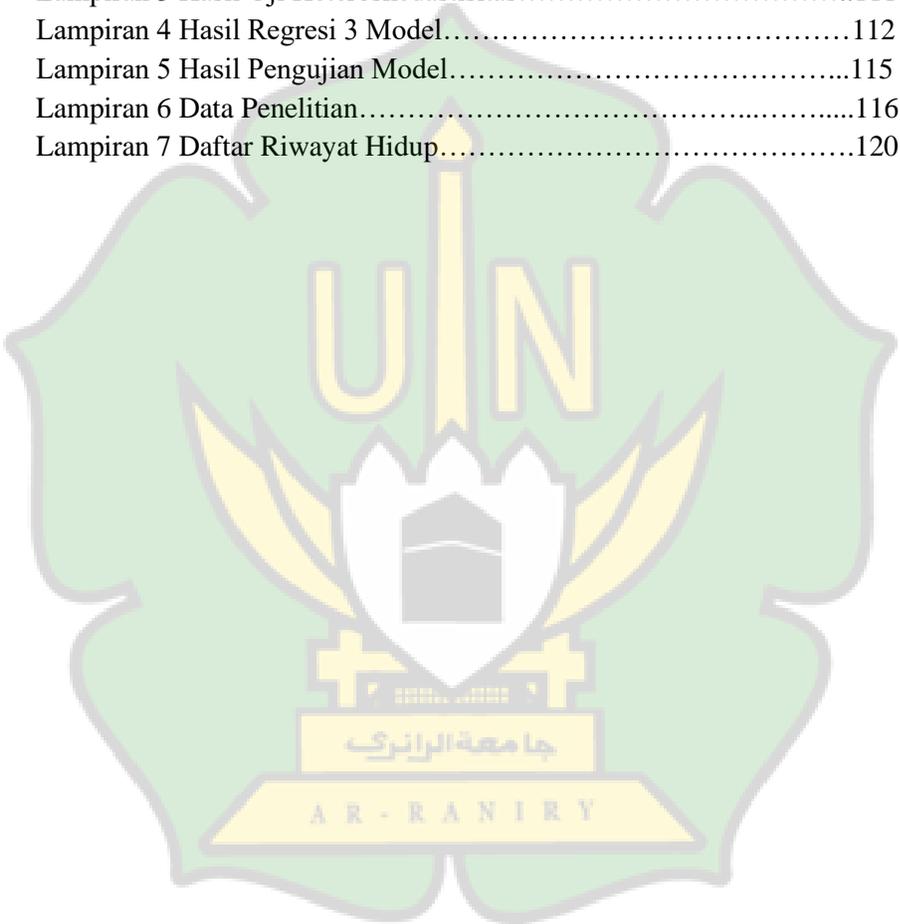
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Anggaran Belanja Modal Aceh.....	2
Gambar 1.2 Bagan Fungsi Belanja Modal terhadap PDRB.....	3
Gambar 1.3 Bagan Fungsi Zakat Terhadap PDRB.....	5
Gambar 1.4 Grafik Realisasi Penerimaan Zakat Aceh.....	6
Gambar 1.5 Grafik Produk Domestik Regional Bruto Aceh.....	7
Gambar 4.1 Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Aceh.....	75
Gambar 4.2 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Aceh.....	77
Gambar 4.3 Realisasi Penerimaan Zakat Pemerintah Aceh.....	79
Gambar 4.4 Uji Normalitas.....	82
Gambar 4.5 Uji Chow.....	85
Gambar 4.6 Uji Hausman.....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Normalitas.....	111
Lampiran 2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	111
Lampiran 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	111
Lampiran 4 Hasil Regresi 3 Model.....	112
Lampiran 5 Hasil Pengujian Model.....	115
Lampiran 6 Data Penelitian.....	116
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	120



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal Islam ialah anggaran. Dalam kebijakan fiskal Islam prioritas utama dalam menyusun anggaran selalu kepada belanja yang bersifat kepada kemaslahatan ummat atau barang publik, seperti pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di masyarakat. Dengan demikian, terlihat jelas pada zaman Rasulullah atau pun masa sahabat alokasi anggaran sangat diperhatikan dan dilakukan secara bijaksana, efektif, dan efisien sehingga tidak terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi perang.

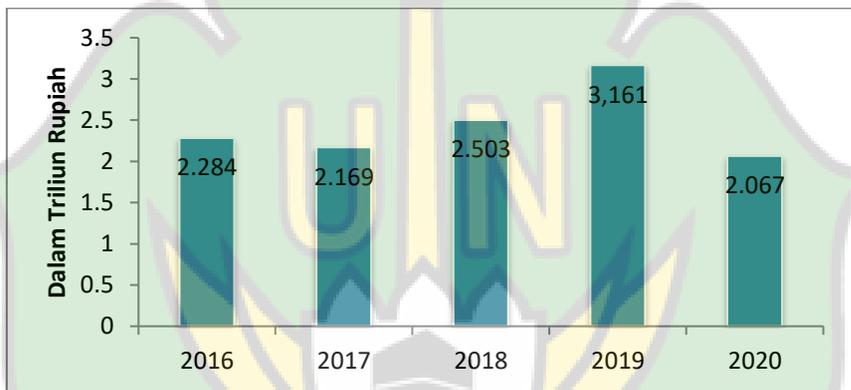
Ekonomi Islam memandang pembangunan infrastruktur adalah hal penting dalam membangun perekonomian suatu daerah demi kesejahteraan ummat. Karena itu dalam Islam, membangun infrastruktur yang memadai merupakan hal yang wajib. Pada dasarnya infrastruktur sangat dibutuhkan bagi suatu daerah sebagai perwujudan dari tercapainya kegiatan perekonomian suatu wilayah. Hal ini selaras dengan tujuan presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa infrastruktur merupakan sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas bagi sebuah negara.

Oleh sebab itu belanja modal menjadi faktor penting dalam pembangunan dalam hal pengadaan barang atau aset lainnya. Belanja

modal akan digunakan oleh pemerintah untuk menambah kekayaan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Fajri, 2016). Maka tidak heran belanja modal merupakan belanja rutin bagi setiap daerah yang akan menambah aset dan kekayaan bagi suatu daerah.

**Gambar 1.1**

**Grafik anggaran Belanja Modal Aceh Tahun 2016-2020**



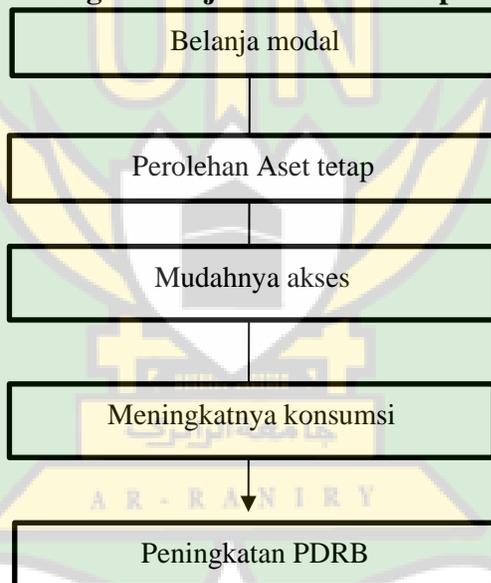
*Sumber : BPS (diolah 2021)*

Selain menambah aset dan kekayaan, belanja modal juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Demikian juga pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah. Semakin banyak uang yang dianggarkan pemerintah daerah untuk belanja, semakin cepat pula terjadinya pertumbuhan ekonomi. hal ini tentunya merupakan harapan bagi semua orang dimana belanja modal yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan

daerah mengingat anggaran yang dialokasikan tiap tahunnya mencapai triliunan (Fajri, 2016).

Belanja modal merupakan investasi yang nyata bagi daerah dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan alokasi anggaran untuk belanja modal akan membuat suatu daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pengaruh belanja modal dapat dijelaskan dalam bagan alur dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Bagan fungsi belanja modal terhadap PDRB**



*Sumber : Data diolah (2022)*

Dalam bagan diatas, terlihat fungsi belanja modal terhadap peningkatan PDRB. Belanja pemerintah dalam hal ini belanja modal

dialokasikan untuk perolehan aset tetap dalam rangka untuk mencapai kemudahan akses dalam bidang ekonomi bagi suatu daerah. Kemudahan akses bagi suatu daerah akan berakibat pada terjadinya peningkatan konsumsi bagi masyarakat. Contohnya pembangunan jalan raya yang bisa membuat jarak tempuh menjadi lebih cepat sehingga bisa memangkas waktu perjalanan. Dengan terjadinya peningkatan konsumsi selanjutnya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain belanja modal, penerimaan zakat menjadi faktor yang penting dalam hal meningkatkan produk domestik regional bruto. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu daerah. Tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Zakat bahkan sudah diwajibkan sejak masa Rasulullah dan sahabat dikarenakan hal ini memiliki manfaat yang besar seperti mengurangi tingkat kemiskinan, terciptanya keadilan diantara masyarakat hingga bisa membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkat. Bahkan para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mau membayar zakat maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Hubungan antara zakat dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini :

**Gambar 1.3**

**Bagan fungsi zakat terhadap PDRB**



*Sumber : Data diolah (2022)*

Zakat dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang kekurangan harta atau kepada para mustahik lainnya. Dengan adanya kebijakan zakat maka akan terjadinya distribusi kekayaan sehingga akan meningkatkan pendapatan para mustahik. Dengan adanya pendapatan dari zakat, para mustahik akan bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian tidak heran zakat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara maupun daerah. Terlebih Aceh merupakan mayoritas penduduk mayoritas muslim sehingga potensi penerimaan zakat bisa lebih dimaksimalkan kedepannya. Kepala Sekreariat Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa potensi zakat Aceh bisa mencapai Rp 2 sampai Rp 4 Triliun. Hal ini tentunya masih sangat jauh dari penerimaan zakat saat ini sehingga kedepannya berpotensi akan menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak Aceh selama 5 Tahun terakhir

**Gambar 1.4**  
**Grafik Realisasi Penerimaan Zakat Aceh**

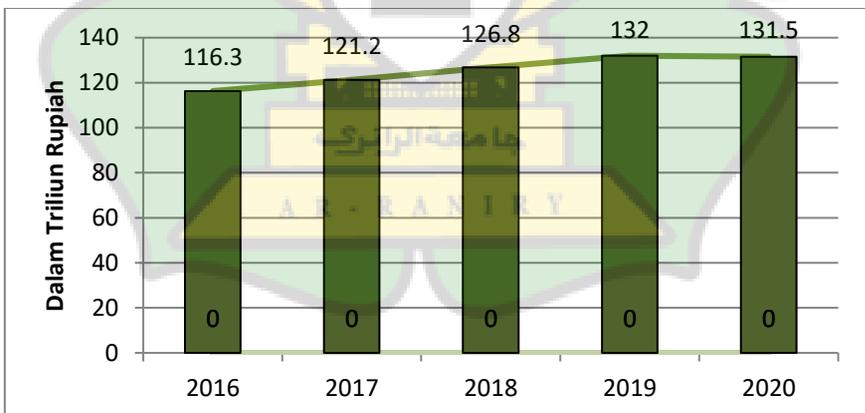


Sumber : Baitul Mal (2021)

Pada Gambar 1.4 dapat terlihat bahwa rata-rata penerimaan zakat Aceh berada di kisaran Rp 50 miliar. Hal ini tentunya masih sangat jauh dari potensi zakat Aceh yang telah disampaikan oleh Kepala Sekreariat Baitul Mal Aceh. Untuk mewujudkan ini tentunya diperlukan kerja sama berbagai pihak sehingga penerimaan zakat dapat lebih besar yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya di Aceh.

Belanja modal yang telah di prioritaskan sebagai pengeluaran oleh pemerintah daerah dan penerimaan zakat kemudian diharapkan dapat meningkatkan nilai produk domestik regional bruto Aceh. PDRB pada dasarnya merupakan indikator penting dalam mengukur suatu kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB yang terus tumbuh tiap tahunnya menunjukkan keberhasilan dari suatu daerah dalam menjalankan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai pertumbuhan PDRB suatu daerah seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, budaya, dan sumber daya modal (Putu dan Kembar, 2014).

**Gambar 1.5**  
**Grafik Produk Domestik Regional Bruto Aceh Tahun 2016-2020**



*Sumber : BPS (diolah 2021)*

Dari data yang telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau selanjutnya disebut BPS, PDRB terus tumbuh tiap tahunnya meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan seluruh sektor unit usaha yang berada di daerah Aceh terus berkembang dari tahun ke tahun. Tren positif ini tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi di Aceh dalam upaya mendongkrak kondisi pertumbuhan ekonomi daerah (BPS, 2020).

Dalam pandangan Islam sendiri pertumbuhan ekonomi haruslah dibarengi dengan keadaan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi manusia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan hal yang sarat nilai. Oleh sebab itu Islam menilai bahwa produksi kegiatan produktif tidak akan dianggap pertumbuhan ekonomi jika faktor pertumbuhannya mencakup komoditas yang dapat merugikan manusia. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam juga terbebas dari hal-hal yang bersifat maisir, gharar, dan juga riba. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh faktor ini tidak akan diakui sebagai pertumbuhan ekonomi. Bahkan Islam menganggap ini merupakan bagian dari kemudharatan dari suatu daerah yang harus segera dihilangkan (Sadeq, 2006).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cindy (2018) tentang pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Pada saat yang sama semua variabel mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Dari hasil penelitian secara umum, belanja modal tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Purwanti (2020) tentang pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena ada ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan kembali penelitian dengan menggunakan variabel belanja modal dan zakat sebagai variabel independen dan PDRB sebagai variabel dependen. Dari Gambar 1.5 terlihat jelas produk domestik regional bruto Aceh cenderung naik tiap tahun meskipun belanja modal dan penerimaan zakat oleh pemerintah tidak selalu meningkat. Inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini apakah belanja modal dan zakat yang dialokasikan maupun diterima secara rutin tidak berdampak terhadap PDRB. Penelitian ini dilakukan di Aceh menggunakan data panel 23 kabupaten/kota dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

## **Pengaruh Belanja Modal dan Zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Aceh?
2. Apakah zakat berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Aceh?
3. Apakah belanja modal dan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh belanja modal terhadap produk domestik regional bruto di Aceh
2. Pengaruh zakat terhadap produk domestik regional bruto di Aceh
3. Pengaruh zakat dan zakat secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis (operasional)**

Adapun manfaat praktis (operasional) dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk instansi pemerintahan Aceh mengenai pentingnya kebijakan alokasi anggaran secara tepat sasaran terutama anggaran belanja modal dan juga pentingnya penerimaan zakat dalam hal meningkatkan PDRB Aceh.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan belanja modal dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.4.2 Manfaat teoritis (akademis)**

Adapun manfaat teoritis (akademis) dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian dan penelitian tentang hubungan antara belanja modal dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Dapat membandingkan dengan lebih banyak referensi untuk studi masa depan, terutama mencari alternatif model hubungan antara berbagai kebijakan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan adalah urutan di mana setiap bab disajikan secara rinci, ringkas, dan jelas. Penulisan sistematis bertujuan untuk menggambarkan secara teratur susunan isi skripsi.

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi sub-bab yang menjadi acuan bagi pemikiran secara sistematis.

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi deskripsi jenis penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, variabel operasional, metode analisis, dan tahapan penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan laporan hasil temuan dan pembahasan terkait dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi utama penelitian ini dan terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

##### **2.1.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto**

Produk domestik regional bruto atau PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui atau menilai kondisi perekonomian suatu daerah. Hartono (2018) menjelaskan bahwa PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dengan cara dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah yang dihitung berdasarkan atas harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2011).

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku secara tahunan menunjukkan perkembangan secara ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya tingkat produksi barang jasa yang dapat dihasilkan dan juga perubahan dalam tingkat harganya serta menunjukkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh penduduk

suatu daerah. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan penanaman modal oleh investor baik lokal ataupun investor luar. Salah satu faktor yang dapat mendorong seorang investor melakukan penanaman modal di suatu daerah tersebut adalah karena melihat faktor ekonomi seperti potensi pasar, sumber daya alam (SDA) dan daya saing. Potensi pasar dapat dilihat dari besarnya pendapatan daerah tersebut yang tercermin oleh nilai PDRB (Habiburahmah, 2012).

Hubungan antara pendapatan suatu daerah (PDRB) dengan investasi sangat penting. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah yang tinggi secara langsung maupun tidak langsung akan memperbesar pendapatan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat yang tinggi akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya permintaan selanjutnya juga akan berdampak positif bagi daerah yang kemudian akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan serta mendorong lebih banyak investasi lainnya. Dengan kata lain, apabila PDRB meningkat maka hal ini menunjukkan investasi searah dengan perkembangan PDRB. Dengan demikian investasi berpengaruh bagi pendapatan daerah atau pun PDRB (Habiburahmah, 2012).

PDRB suatu daerah akan selalu berubah tiap tahunnya, baik itu meningkat maupun mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah nilai dapat yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang dapat dihasilkan dalam suatu daerah tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan

bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya (Kadek dan Bagus, 2015). Subandi (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumber daya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan universal untuk anak-anak dan pensiun publik.

### **2.1.2 Konsep Domestik dan Regional**

Pada dasarnya wilayah perekonomian yang menjadi tempat penelitian perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto adalah suatu negara, sedangkan dalam hal menghitung tingkat pertumbuhan regional ditujukan kepada suatu daerah dari wilayah negara. Daerah dalam menghitung PDRB secara umum dibagi menjadi daerah tingkat I atau Provinsi dan Daerah Tingkat II atau yang biasa disebut kabupaten/kota. Transaksi yang terjadi dalam wilayah suatu daerah tersebut yang umumnya dilakukan oleh masyarakat akan dihitung sebagai kegiatan ekonomi (BPS, 2008).

Semua barang dan jasa hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, baik itu faktor produksinya berasal dari dalam maupun luar tanpa memperhatikan asal pemilik kegiatan baik itu penduduk lokal atau pun luar merupakan kegiatan produk

domestik daerah tersebut. Pendapatan yang didapatkan atas kegiatan yang disebabkan karena adanya proses produksi tersebut merupakan pendapatan domestik suatu daerah yang bersangkutan. Wilayah domestik suatu daerah mencakup daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis suatu pemerintahan daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa (BPS, 2008).

Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah biasanya juga berasal dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor (BPS, 2018).

Produk regional merupakan produk dalam negeri yang dapat dihasilkan oleh suatu unit usaha ditambah pendapatan yang diperoleh dari luar daerah atau luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang harus dibayarkan ke luar daerah/negara. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa PDRB daerah mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang berada di suatu wilayah atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah.

### 2.1.3 Indikator Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum struktur PDRB berbeda-beda tergantung dari sudut mana suatu perekonomian dilihat. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) struktur PDRB dibagi menjadi 3, yaitu:

#### 1. PDRB menurut lapangan usaha Atau faktor produksi

PDRB menurut susunan lapangan usaha merupakan data yang disajikan untuk memberikan gambaran mengenai fungsi dan peranan berbagai sektor dalam hal menciptakan nilai tambah PDRB suatu daerah. PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor, yaitu:

- a. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
- b. Pertambangan dan penggalian.
- c. Industri pengolahan.
- d. Pengadaan listrik dan gas.
- e. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang.
- f. Konstruksi.
- g. Perdagangan besar dan eceran.
- h. Transportasi dan pergudangan.
- i. Penyediaan akomodasi.
- j. Informasi dan komunikasi.
- k. Jasa keuangan dan asuransi.
- l. Real estate.
- m. Jasa perusahaan.
- n. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial.
- o. Jasa pendidikan.

- p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- q. Jasa lainnya.

## 2. PDRB menurut andilnya Produksi

PDRB menurut sektor andilnya produksi merupakan data yang diperoleh atas besarnya balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Jenis-jenis balas jasa tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. balas jasa oleh pekerja berupa upah dan gaji,
- b. pendapatan dari unit produksi yang tidak berbadan hukum,
- c. pendapatan sewa tanah dan royalty,
- d. bunga dan
- e. keuntungan.

## 3. PDRB menurut jenis Pengeluaran

PDRB menurut sektor penggunaan tersebut memberikan gambaran penggunaan barang dan jasa akhir oleh berbagai kegiatan ekonomi. Penggunaan tersebut antara lain untuk konsumsi rumah tangga dan pemerintah, penggunaan sebagai barang modal tetap, dan ekspor neto. Pada saat yang sama, yang tidak terpakai kemudian akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan sebagai perubahan stok. Berikut ini adalah jenis-jenis PDRB menurut tujuannya:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah

- d. Pembentukan modal tetap bruto
- e. Perubahan stok
- f. Ekspor neto atau ekspor-impor

PDRB kabupaten/kota berdasarkan harga berlaku dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menghitung data yang berasal dari masing-masing wilayah. Metode langsung dapat mengungkapkan kondisi atau karakteristik sosial ekonomi suatu daerah. Manfaat menggunakan data daerah adalah statistik daerah yang lemah dapat ditingkatkan. Hasil perhitungan akan menunjukkan nilai semua barang dan jasa yang dapat dihasilkan suatu daerah. Ada tiga metode metode langsung: metode produksi, metode pendapatan dan metode pengeluaran (BPS, 2008).

Metode tidak langsung atau yang biasa dikenal dengan metode distribusi pendapatan daerah adalah metode penghitungan besaran pendapatan daerah suatu kabupaten/kota, yang dilakukan dengan cara mengalokasikan angka pendapatan daerah provinsi untuk setiap kabupaten/kota dengan menggunakan beberapa jenis pengalokasi. Alokasi yang dapat digunakan adalah: (1) produksi bruto atau neto, (2) produksi fisik bruto, (3) tenaga kerja, (4) jumlah penduduk, dan (5) pengalokasi lain yang sesuai dengan wilayah (BPS, 2008). Dengan menggunakan kombinasi pengalokasian tersebut, persentase bagian untuk setiap kabupaten/kota dapat dihitung, sehingga nilai tambah untuk setiap sektor atau sub-sektor dapat ditentukan.

## **2.2 Pertumbuhan dalam Ekonomi Islam**

### **2.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Islam**

Dalam ilmu ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai suatu negara atau daerah dapat diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil, produk nasional bruto (PNB) daerah atau produk domestik bruto daerah. Dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti bahwa terjadinya perkembangan ekonomi fiskal yang dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah ataupun meningkatnya produksi barang pada sektor industri, pembangunan infrastruktur, penambahan fasilitas publik, lebih berkembangnya kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan dalam kegiatan ekonomi lainnya. Sebagian ahli ekonomi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Almizan, 2016).

Islam melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih dari sekedar dari itu. Dalam pandangan ekonomi Islam, pembangunan ekonomi merupakan proses sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara memperhatikan dan juga menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan ekonomi Islam bersifat multidimensi, mencakup berbagai aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi dalam hidup ini, tetapi juga memikirkan bagaimana mencapai kesejahteraan di kehidupan

selanjutnya. Keduanya senantiasa bersatu dan saling mempengaruhi menurut Islam (Mahrusy, 2009).

Hassan (2004) Islam memandang pembangunan ekonomi sebagai proses peningkatan kedewasaan insan, serta kemajuan materi wajib dibarengi kedewasaan rohani. Beberapa tujuan penting yang harus diprioritaskan pada perekonomian, yaitu seperti pertumbuhan lapangan kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif, serta kepedulian terhadap alam. Muhammad (2010) menjelaskan pembangunan ekonomi yg ideal adalah pembangunan yg memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar semua manusia. di sisi lain, fenomena mirip konsumsi hiperbola, korupsi moral, serta keserakahan ekonomi ialah ciri-ciri awal runtuhnya sebuah peradaban manusia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi menurut Islam adalah proses perkembangan yang berkelanjutan yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia demi mencapai tujuan di dunia dan falah di akhirat.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan peningkatan barang dan jasa, tetapi juga keseimbangan antara kualitas moral dan akhlak serta mencapai tujuan dunia dan akhirat. Bila pertumbuhan ekonomi yg terjadi justru membentuk terjadinya sumber keterbelakangan, kekacauan serta menghasilkan insan jauh

dari nilai keadilan dan kemanusiaan, maka pertumbuhan ekonomi ini bukanlah tujuan yg dibutuhkan oleh ekonomi Islam.

Ada berbagai faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah. Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor ini sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Almizan (2016) menyebutkan faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Sumber daya yang dapat dikelola
2. Sumber daya manusia dan Wirausaha
3. Teknologi

Selain itu dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan konsep Islam, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat dan efektif. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam adalah pembangunan sektor pendidikan yang berkualitas yang dibarengi dengan penerapan nilai-nilai keislaman. Hal ini penting dilakukan dan juga dibutuhkan untuk mempersiapkan tantangan perekonomian global yang semakin besar dimasa akan datang sehingga SDM kita bersaing dalam perekonomian dunia. Dengan pembangunan sektor pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM negara yang berkualitas dan unggul, yang akan membawa negara ini kearah yang lebih baik dimasa depan (Almizan, 2016).

Pendidikan adalah sebuah solusi dan juga cara dalam menaikkan kualitas hidup pada segala bidang, oleh karena itu sepanjang sejarah kehidupan manusia pada muka bumi ini, hampir

tidak terdapat sekelompok manusia yg tidak memakai pendidikan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas. Meskipun pendidikan menurut standar hidup masing-masing masyarakat dan kondisi budaya menggunakan sistem dan pendekatan yang berbeda. Bahkan, pendidikan juga digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pandangan hidup. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk menciptakan masyarakat sosial yang berkarakter baik.

Dalam perspektif Islam, Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql) keturunan (nasl), dan harta (mal). Selanjutnya, fokus pembangunan ekonomi tidak terletak pada pembangunan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya dalam kaitannya sebagai khalifat Allah di bumi (Rama, 2013). Hal ini berarti tidak hanya dengan mewujudkan keberhasilan pemenuhan kebutuhan material dunia saja, namun pula kebutuhan serta persiapan buat kehidupan akhirat yang kekal dan lebih terjamin sebagaimana konsep dasar ekonomi islam, mencari kesuksesan (falah) dunia serta pula akhirat.

Mengetahui pentingnya pengembangan sumber daya manusia, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan atau pun berkaitan erat dengan tentang alokasi anggaran belanja modal dan penerimaan zakat. Kedua faktor ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya

manusia. Belanja modal yang dialokasikan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pembangunan jalan, irigasi dan lainnya yang sejatinya bertujuan untuk kesejahteraan ummat, sedangkan penerimaan zakat digunakan untuk memberikan modal maupun meningkatkan kesejahteraan bagi orang yang kurang mampu sehingga secara perlahan dapat merubah kondisi perekonomiannya.

### **2.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Islam**

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam juga menganggap salah satu keberhasilan indikator pertumbuhan ekonomi ialah mampu memberikan kontribusi bagi kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat. Oleh karena itu indikator pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam merupakan kesejahteraan secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan material (dunia) dan kesejahteraan spiritual (kehidupan akhirat). Konsep kesejahteraan pada ekonomi Islam tidak hanya diukur menggunakan nilai ekonomi, tetapi juga lebih memperhatikan nilai-nilai moral, spiritual dan sosial sehingga konsep kesejahteraan bagi ekonomi Islam lebih mendalam (Sardar, 2016).

Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI (2008) menjelaskan bahwa kesejahteraan berdasarkan ekonomi Islam meliputi 2 pengertian, yaitu :

1. Kesejahteraan keseluruhan dan seimbang, yaitu ketersediaan materi yang didukung pula juga dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual yg meliputi individu dan sosial. Hal ini dikarenakan sosok insan terdiri atas unsur fisik dan jiwa yang membuat kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula insan memiliki dimensi individual sekaligus sosial. insan akan merasa suka jika terdapat keseimbangan diantara dirinya serta lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan pada dunia serta pula di akhirat. Hal ini dikarenakan manusia tidak hanya akan hidup di dunia, namun juga akan hidup di akhirat kelak yang kekal dan abadi selamanya. Kecukupan materi di dunia hanya ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan atau mencari amal untuk akhirat. Jika syarat dalam hal dunia ini tidak tercapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini adalah sesuatu yang tidak pernah habis, lebih bernilai serta berharga dibanding kehidupan dunia.

## **2.3 Kebijakan Fiskal**

### **2.3.1 Konsep Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian suatu negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan

ataupun pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah dalam hal anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu dapat diartikan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pendapatan suatu negara dan juga pengeluaran pemerintah sebagaimana yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya dalam rencana pembangunan.

Wolfson dalam buku Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik (Suparkomo, 1997) Kebijakan fiskal adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan mengubah berbagai kebijakan seperti pendapatan dan belanja pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetapan harga barang dan jasa perusahaan tujuannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudirman (2017) menjelaskan kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Kebijakan fiskal merupakan suatu komponen kebijakan publik mengenai tindakan perekonomian yang akan dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dalam hal pendapatan dan juga

pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Tujuan umum dalam jangka pendek dari kebijakan fiskal yang ingin dicapai adalah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat, sedangkan dalam jangka panjang kebijakan fiskal ingin mempengaruhi tingkat penawaran seperti terjadinya peningkatan dalam hal kapasitas perekonomian (Surjaningsih, 2012).

Pengeluaran pemerintah ini tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor dalam hal kegiatan perekonomian. Dengan adanya pengeluaran yang dilakukan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor yang menjadi fokus pemerintah. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi tentunya akan berpengaruh langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah itu sendiri, sedangkan untuk sektor tidak berpengaruh langsung terhadap perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan memfokuskan sektor pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sehingga akan meningkatkan produksi (Rantebua et al., 2020).

Karim (2007) dalam pemikiran ekonomi konvensional menjelaskan ada beberapa instrumen atau pun kebijakan yang dapat dilakukan dalam hal meningkatkan APBN untuk menunjang kegiatan perekonomian yaitu:

1. Melakukan kegiatan bisnis

Pemerintah dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam hal bisnis seperti perusahaan lain, yaitu dengan cara mendirikan badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan pendapatan. Pendirian BUMN ini diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang bisa digunakan digunakan sebagai salah satu sumber penunjang pendapatan negara.

## 2. Pajak

Pajak merupakan salah satu penghimpunan dana yang umum dilakukan pemerintah sekaligus menjadi pendapatan terbesar pemerintah. Pajak bisa dihimpun sesuai dengan kategorinya masing-masing pajak pendapatan, pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain.

## 3. Meminjam Uang

Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, pemerintah dapat meminjam atau berhutang uang dari masyarakat atau sumber lain dengan syarat harus dibayar kembali di kemudian hari. Disisi lain masyarakat juga harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas mengenai konsekuensi yang akan diperoleh ketika pemerintah berhutang misalnya kepada negara lain seperti membayar pajak yang lebih besar di kemudian hari. Kebijakan dalam hal meminjam uang sejatinya hanya bisa digunakan untuk sementara sehingga tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Anggaran pemerintah untuk belanja biasanya akan disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya terdapat 3 jenis belanja pemerintah.

Pemerintah hanya akan berbelanja sesuai dengan pendapatan yang diperoleh negara sehingga belanja ini disebut anggaran belanja berimbang. Namun apabila tingkat perekonomian di sebuah negara atau wilayah baik, pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya sehingga belanja negara dapat dihemat atau biasa disebut dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat perekonomian di suatu daerah rendah seperti banyak pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya maka pemerintah biasanya akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Hal ini untuk menunjang tingkat perekonomian daerah sehingga bisa mengurangi permasalahan ekonomi. Belanja pemerintah yang melebihi dari tingkat penerimaannya maka akan menimbulkan keadaan defisit anggaran (Rozalinda, 2014).

### **2.3.2 Ekonomi Fiskal dalam Islam**

Kebijakan fiskal dianggap sangat penting dalam tatanan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal adalah cara untuk mencapai tujuan Syariah. Tujuan hukum Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan tetap memelihara iman, kehidupan, kebijaksanaan, kekayaan dan kepemilikan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal dan penganggaran bertujuan untuk menciptakan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Mengacu pada praktik pada masa Rasulullah, dapat digaris bawahi bahwa kebijakan fiskal Islam merupakan kebijakan

keuangan publik terkait dengan prinsip penyelenggaraan negara untuk kemaslahatan umat. Seluruh warga negara bagaikan berada dalam satu keluarga besar. Ada rasa sepenanggungan dan saling menjamin (takaful). Zakat misalnya berorientasi pada sikap saling berbagi, diambil dari yang berlebih diberikan kepada yang kekurangan (Murtadho, 2013). Kebijakan fiskal dipandang sebagai cara untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia melalui insentif yang diberikan melalui peningkatan pendapatan pemerintah seperti diantaranya pajak, pinjaman, atau jaminan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal suatu negara tentunya harus sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan utama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia (Rozalinda, 2014).

Konsep Islam tentang kesejahteraan sangat luas, mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, dan karena itu menekankan kemajuan spiritual di atas kekayaan materi. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, negara-negara dengan orientasi nilai, etika, dan dimensi sosial tertentu dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara-negara Islam diharapkan dapat memainkan fungsi distribusi, distribusi, dan stabilitas. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam menurut Rozalinda (2014) adalah:

1. Negara membelanjakan hanya berdasarkan pendapatan, sehingga meminimalkan terjadinya defisit anggaran.
2. Perpajakan proporsional, perpajakan dalam ekonomi Islam dipungut sesuai dengan tingkat produktivitas. Misalnya di Haraj, pajaknya didasarkan pada tingkat kesuburan tanah, ketersediaan irigasi, dan jenis tanaman.
3. Zakat didasarkan pada keuntungan, bukan hanya pada kuantitas barang. Misalnya pada zakat perdagangan, zakat yang harus dikeluarkan merupakan hasil keuntungan dari perdagangan, sehingga beban biaya produksi tidak termasuk.

Dalam sejarah ekonomi Islam, kebijakan fiskal memegang peranan yang penting dan strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan baik sehingga sesuai dengan rencana dan selalu terarah. Azwar (2016) menyatakan bahwa instrumen kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan fiskal sudah ada di awal pemerintahan Islam. Instrumen tersebut yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan negara dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebagai pemimpin umat Islam saat itu, Rasulullah menyusun perencanaan yang dimulai dengan memperkuat masyarakat atau ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam sebagai kunci peningkatan pendapatan nasional antara kelompok Muhajirin dan Ansar.
2. Kebijakan pajak. Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Nabi (seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat) dirancang untuk menciptakan stabilitas harga dan menekan inflasi.

3. Anggaran. Dalam penyusunan anggarannya, kebijakan fiskal syariah selalu mengutamakan belanja yang membawa manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur.
4. Kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal khusus, Rasulullah berlandaskan pada prinsip persaudaraan. Kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah adalah:
  - a. Memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan umat yang membutuhkan.
  - b. Meminjam peralatan dari kaum Quraisy dengan catatan pengembalian dan harus ganti rugi jika terjadi kerusakan.
  - c. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang yang baru masuk Islam (mualaf).
  - d. Menerapkan kebijakan insentif yang bertujuan dalam mempertahankan pengeluaran negara dan meningkatkan partisipasi kerja dan tingkat produksi.

#### **2.4 Keuangan Publik Islam**

Keuangan publik Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat luas, dengan tujuan mendasar untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Landasan untuk merumuskan sistem keuangan ekonomi Islam dan kebijakan fiskal adalah nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan perkembangan zaman, keuangan publik Islam terus menerus disesuaikan. Namun, mekanisme pengelolaan keuangan publik,

khususnya kebijakan fiskal, masih berdasarkan prinsip pendapatan dan belanja yang sesuai dengan nilai syariat (Zuhdi, 2019).

Kahf (1998) masalah keuangan publik yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran publik memiliki dua kriteria, yaitu melayani kepentingan seluruh umat Islam dengan baik, dan juga mengatur kepentingan tersebut menurut sumber wahyu yaitu Al-Qur'an dan hadits. Kebijakan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Pengeluaran yang diperlukan untuk urusan sehari-hari pemerintah. 2. Belanja umum pemerintah dengan sumber pendanaan. 3. Belanja publik terkait dengan proyek yang disetujui masyarakat dan sistem pendanaannya. Zuhdi (2019), prinsip syariah terkait pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan operasional secara rutin harus mengacu pada prinsip di atas. Secara khusus, belanja negara harus didasarkan pada:

1. Kebijakan pengeluaran rutin oleh pemerintah harus didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok.
2. Asas pengeluaran rutin menggunakan prinsip efisiensi yaitu memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ini akan membebaskan pemerintah dari sifat mubazir dalam belanja dan tidak mengalokasikan ke sektor-sektor yang bertentangan dengan hukum Syariah.
3. Distribusi pengeluaran tidak boleh memihak kepada yang kaya, tetapi diperbolehkan untuk memihak kepada yang miskin.

4. Asas komitmen diatur dalam syariat, sehingga alokasi belanja negara hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang halal dan dijauhkan dari hal-hal yang haram.
5. Prinsip komitmen dimulai dari keutamaan Syariah, dari yang wajib, sunnah, mubah atau dharurah, hajiyyat dan kamaliyah.

## **2.5 Belanja Modal**

### **2.5.1 Definisi Belanja Modal**

Belanja modal adalah jenis belanja langsung yang termasuk dalam anggaran tahunan APBN/APBD pemerintah negara dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat selama beberapa periode akuntansi. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk aset tetap berwujud yang dapat memperoleh manfaat dari lebih dari satu periode akuntansi (Rekanaharto, 2013).

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang pendapatannya dalam periode akuntansi melebihi 1 tahun, yang akan menambah aset atau kekayaan di daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan aset tetap tertentu (Nordiawan, 2006).

Nilai pengembangan aset tetap berwujud hanya dimasukkan dalam anggaran belanja untuk pembelian atau pembangunan aset atau untuk belanja modal berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun

2006, yang meliputi: belanja modal tanah, peralatan dan mesin, belanja modal, belanja modal konstruksi dan konstruksi, belanja modal jalan dan jaringan irigasi, belanja modal lainnya, dan belanja modal unit pelayanan publik (BLU). Untuk lebih jelasnya, berikut adalah indikator yang termasuk dalam belanja modal

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ & + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja} \\ & \text{Jalan, Irigrasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset} \\ & \text{Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

Pada dasarnya belanja modal merupakan belanja rutin yang memiliki manfaat beberapa periode akuntansi, yang akan meningkatkan aset dan kekayaan suatu daerah. Belanja modal merupakan strategi alokasi belanja daerah sebagai kegiatan investasi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Belanja modal akan berperan dalam pada penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di daerah, bahkan kegagalan daerah untuk menarik modal di daerahnya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu, belanja modal menjadi salah satu prioritas pemerintah setiap tahunnya (Afia, 2010).

### **2.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Halim (2004) belanja modal meliputi: 1) belanja modal tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja gedung dan konstruksi, 4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan 5) belanja aset tetap

lainnya 6) pengadaan sesuatu barang yang lain. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005), belanja modal dapat dibagi menjadi lima kategori utama, yaitu:

1. Belanja modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya pemerintah daerah untuk pengadaan/pembelian/emansipasi/penempatan, peralihan nama dan sewa tanah, peralatan, pematangan tanah, pembebasan, penyimpanan, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah sampai tanah tersebut tersedia.

2. Belanja Modal Peralatan serta Mesin

Belanja modal peralatan serta mesin artinya pengeluaran/biaya yang dipergunakan oleh Pemda buat pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan inventaris tempat kerja yg dapat menyampaikan manfaat lebih berasal 12 bulan atau 1 tahun sampai alat-alat dan mesin dimaksud dalam syarat siap gunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung serta bangunan ialah pengeluaran yang digunakan oleh Pemda untuk pengadaan/penggantian/penambahan serta termasuk pengeluaran untuk perencanaan, supervisi dan pengelolaan pembangunan

gedung serta bangunan yang dapat menambah kapasitas gedung dan bangunan dimaksud hingga syarat siap pakai.

4. Belanja modal Jalan, Irigasi serta Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya pemerintah daerah untuk pengadaan/penambahan/penggantian/perbaikan pembangunan, pembangunan dan pemeliharaan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan jalan dan jaringan irigasi untuk peningkatan kapasitas jalan, irigasi dan jaringan tersedia dalam kondisi siap digunakan.

5. Belanja modal Fisik lainnya

Belanja Modal fisik Lainnya adalah belanja/ biaya pemerintah daerah untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan dan pemeliharaan modal berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kriteria belanja modal untuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, dan Jalan, irigasi dan jaringan. Lihat tabel di bawah untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi belanja modal:

**Tabel 2.1**

**Komponen Biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal**

No	Jenis belanja modal	Komponen Biaya di dalam Belanja Modal
1	Belanja Modal Tanah	a. Belanja modal pembebasan tanah

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Jenis belanja modal</b>	<b>Komponen Biaya di dalam Belanja Modal</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Belanja modal pembayaran Honor tim tanah</li> <li>c. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah</li> <li>d. Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah</li> <li>e. Belanja modal biaya pengukuran tanah</li> <li>f. Belanja modal perjalanan pengadaan tanah</li> </ul>
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan</li> <li>b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan</li> <li>c. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan Belanja modal perizinan gedung dan bangunan</li> <li>d. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran</li> <li>e. bangunan lama gedung dan bangunan belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan</li> </ul>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Jenis belanja modal</b>	<b>Komponen Biaya di dalam Belanja Modal</b>
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin</li> <li>b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin</li> <li>c. Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin</li> <li>d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin</li> </ul>
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan</li> <li>b. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan</li> <li>c. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan.</li> <li>d. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan</li> <li>e. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan</li> <li>f. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan</li> <li>g. belanja modal pengosongan dan pembongkaran Bangunan lama</li> </ul>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Jenis belanja modal</b>	<b>Komponen Biaya di dalam Belanja Modal</b>
		<p>h. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan</p> <p>i. Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan</p> <p>j. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan</p> <p>k. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan</p> <p>l. belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan</p> <p>m. belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan</p>
5.	Belanja modal fisik lainnya	<p>a. Belanja modal bahan baku fisik lainnya</p> <p>b. Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya</p> <p>c. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya</p> <p>d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya</p>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Jenis belanja modal</b>	<b>Komponen Biaya di dalam Belanja Modal</b>
		e. Belanja modal perizinan fisik lainnya

### **2.5.3 Peranan Belanja Modal**

Belanja pembangunan memegang peranan penting dalam hal meningkatkan pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjadikannya lebih baik berdasarkan kebutuhan masyarakat secara umum dan kebutuhan serta dinamika yang ada. Peningkatan belanja pembangunan yang terjadi di daerah berarti pendapatan meningkat setiap tahun dan pemerintah berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengeluaran pembangunan dapat dilihat dari perkembangan suatu daerah atau pendapatan utama daerah, yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas masyarakat, juga mencerminkan perkembangan suatu daerah (Halim, 2002).

Pada era desentralisasi fiskal sekarang ini, peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik sangatlah penting. Hal ini dikarenakan peningkatan layanan pada sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor untuk masuk dan berinvestasi di daerah. Oleh karena itu, belanja sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya yang nyata untuk dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik yang dapat dilakukan

dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset-aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Meningkatnya pengeluaran belanja modal, disisi lain juga meningkatkan pelayanan kepada publik karena fungsi pengeluaran belanja modal sejatinya juga meningkatnya aset tetap suatu daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda (Wijayanti, 2015). Selain itu, belanja juga memiliki 3 fungsi utama dalam melaksanakan berbagai prioritas kegiatan pembangunan dan mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan. 3 fungsi utama dari belanja adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pelayanan umum. Fungsi pertama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan yang bersifat penting pada umumnya.
2. Fungsi ekonomi. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai peningkatan seperti ketahanan pangan, energi, infrastruktur, teknologi dan lain-lain.
3. Fungsi perlindungan sosial. Yaitu fungsi untuk mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan perlindungan sosial.

Mengetahui besarnya pengaruh belanja dalam mencapai suatu tujuan ekonomi ataupun fungsi lainnya, pemerintah daerah biasanya setiap tahun selalu menganggarkan belanja modal dalam APBN/APBD. Demi mencapai tujuan ekonomi pemerintah daerah selalu menetapkan anggaran untuk belanja modal tiap tahunnya. Hal

yang sama juga berlaku bagi daerah lainnya di Indonesia dalam hal anggaran alokasi untuk belanja modal. Hal ini dilakukan untuk menambah aset dan kekayaan bagi suatu daerah itu sendiri sehingga di harapkan kedepannya peningkatan dari pembangunan dampak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat menyerap tenaga kerja, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran (Zulfa, 2016).

Peningkatan untuk alokasi belanja modal seperti peralatan, infrastruktur dan lainnya sangat penting dilakukan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Hal ini karena pada dasarnya semakin tinggi alokasi belanja modal, diharapkan perekonomian semakin produktif, memungkinkan pembangunan berbagai daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan investasi yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Gusti dan Arka, 2016).

## **2.6 Zakat**

### **2.6.1 Konsep Zakat**

Zakat merupakan bagian dari jumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan para mustahik lainnya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Salim (2016) menjelaskan bahwa secara bahasa, zakat artinya bertambah dan berkembang, sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk

ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Menurut Qardhawi (1996) Zakat merupakan mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau pun mustahik dengan persyaratan tertentu yang sesuai syariat. Zakat termasuk ibadah maaliyah ijtimai'iyah, yaitu ibadah di bidang harta bagi orang yang memiliki harta berlebih yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat ialah harta yg harus dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam (muslim) ataupun badan usaha buat diserahkan kepada yg berhak menerimanya (sinkron) dengan ketentuan syariat Islam. namun berdasarkan pendapat asal kalangan beberapa ulama, zakat fitrah wajib diberikan terlebih dahulu kepada 2 golongan pertama yakni golongan fakir dan jua golongan miskin.

Secara umum penerima zakat sudah ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 kedalam 8 golongan, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta sama sekali sehingga menyebabkan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta benda tetapi seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
3. Amil, yaitu orang yang membantu mengumpulkan dan menyalurkan zakat
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk dan belajar tentang Islam, sehingga membutuhkan bantuan untuk lebih memperkuat tauhid dan syariatnya.
5. Riqab, yaitu seorang budak atau pun kaum dari hamba sahaya yang ingin mendapat hak merdeka untuk diri sendiri.
6. Gharimin, yaitu seseorang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan jiwa dan izzah.
7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah seperti jihad dan semacamnya.
8. Ibnu sabil, yaitu seseorang yang kehabisan biaya atau pun uang dalam perjalanan yang sifatnya dapat menambah ketaatan kepada Allah.

### **2.6.2 Indikator Zakat**

Zakat merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara atau pun daerah dimana memiliki manfaat yang sangat besar dari segi perekonomian. Hal ini dikarenakan zakat dapat meningkatkan konsumsi bagi mustahik. Selain itu zakat juga bisa meminimalisir kekayaan pada kelompok tertentu (Rozalinda, 2014). Bukan hanya itu saja, banyak sekali fungsi atau pun dampak dari penerimaan

zakat. Agustin (2020) menjelaskan setidaknya ada 3 manfaat yang ingin diperoleh dari diwajibkannya zakat. Manfaat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Pada bagan diatas dapat dilihat setidaknya ada 3 tujuan utama dari zakat yaitu kesejahteraan, IPM dan tingkat kemandirian yang ingin dicapai. Pada indikator kesejahteraan dapat dilihat pada demografi keluarga mustahik. Indeks pembangunan manusia dapat dilihat dengan tingkat pendidikan dan kesehatan, sedangkan indikator kemandirian dapat dilihat sejauh mana tingkat kemandirian produktivitas keluarga mustahik.

### **2.6.3 Jenis-Jenis Zakat**

Andriani (2017) menyatakan pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun pengertian dari kedua jenis zakat tersebut adalah:

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim ketika menjelang hari raya idul fitri baik itu orang tua, muda, atau pun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibayar dalam bentuk beras (makanan pokok) atau juga dapat diganti dengan uang sesuai ketentuan yang berlaku. Zakat fitrah dikeluarkan sebagai

bentuk syukur seorang muslim kepada Allah karena telah melaksanakan ibadah puasa. Zakat ini juga dimaksudkan untuk membersihkan diri dari dosa dan membuat hati merasa lebih tenang. Selain itu zakat fitrah juga akan membuat gembira hati bagi fakir miskin yang memiliki kekurangan dari segi harta sehingga bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari kemenangan.

## 2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang telah dimiliki dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara syariat setelah mencapai waktu, dan jumlah tertentu pula. Menurut Qardhawi (2007), zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Berikut macam-macam zakat mal, yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat hewan ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat perdagangan
- d. Zakat hasil pertanian
- e. Zakat hasil pertambangan
- f. Zakat profesi
- g. Zakat surat berharga (investasi)
- h. Zakat rikaz

## 2.7 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh belanja modal dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB adalah sebagai berikut :

1. Rekanaharto (2013) Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Tulung Bawang tahun 2003-2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis menunjukkan terdapat hubungan kuat antara belanja pegawai dan modal terhadap PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tulung Bawang. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan belanja pegawai dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 60%, sedangkan sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Lestari et al., (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Belanja Modal Dan Angkatan Kerja Terhadap PDRB Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat hubungan antara pengaruh langsung angkatan kerja terhadap PDRB dan juga untuk mengetahui pengaruh tak langsung dari PAD dan belanja modal terhadap PDRB melalui pengeluaran pembangunan. Teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Hasil tersebut menunjukkan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan pengeluaran pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

3. Fajri (2016) mempelajari dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan belanja modal dan dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Dari hasil penelitian, Provinsi Lampung memiliki tingkat perkembangan belanja modal tertinggi sebesar 41%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung masing-masing sebesar 18%. Sementara itu, perkembangan belanja modal di Provinsi Aceh paling rendah yaitu -4%. Secara umum, belanja modal tidak berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera.
4. Putra (2019) melakukan penelitian mengenai PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat pengangguran di Bali. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin

menganalisis pengaruh PAD serta belanja modal pada pertumbuhan ekonomi, pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, serta pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh pada tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan, belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan, namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi secara tidak langsung pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.

5. Rahma, Ade et al (2020) melakukan penelitian yang menganalisis dampak Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2016-2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pengaruh zakat, infaq dan shadaqah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier dengan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara,

sedangkan infaq dan shadaqah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, dana zakat, infaq, dan shadaqah secara umum berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

6. Purwanti (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisis pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear menggunakan data panel. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Zakat infaq dan Sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Peningkatan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun akan meningkatkan konsumsi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dalam hal ini masyarakat miskin, sehingga akan meningkatkan konsumsi agregat, dan pada akhirnya akan meningkatkan PDB riil nasional.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rekana-harto (2013)	Analisis regresi linear berganda	Belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap	Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi (PDRB)	Variabel Independen : Belanja Pegawai. Perspektif Ekonomi Islam

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tulung Bawang	Variabel Independen :belanja modal	
2	Putu, et al., (2014)	Path Analisis	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan	Variabel independen :Belanja modal	Variabel dependen: Pengeluaran pembangunan. Variabel independen : Pendapatan asli daerah. Perspektif Ekonomi Islam
3	Ahmad Fajri (2016)	Analisis regresi linear berganda	Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera	Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi (PDRB). Variabel Independen : Belanja Modal	Variabel Independen : Zakat. Perspektif Ekonomi Islam

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
4	Nyoman Astrayas et al., (2019)	Path Anlisis	Penganggu-ran. Pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi secara langsung pada tingkat penganggu-ran di kabupaten/ kota Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.	Variabel dependen : Pertumbuh-an ekonomi. Variabel independen : Belanja modal.	Variabel independen : Pendapatan asli daerah. Perspektif Ekonomi Islam
5	Rahma, Ade et al., (2020)	Analisi sregresi linear berganda	Zakat berpengaruh signifikan sedangkan dana infak dan shadaqah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Variabel Dependen : Pertumbuh-an ekonomi (PDRB) Variabel Independen : zakat	Variabel Independen : infaq dan sedekah. Perspektif Ekonomi Islam
6	Purwan-ti, (2020)	Analisis regresi linear berganda	ZIS berpengaruh positif terhadap pertumbuha ekonomi Indonesia.	Variabel dependen : Pertumbuh-an ekonomi Variabel independen : zakat	Variabel independen : infaq dan sedekah. Perspektif ekonomi Islam

## **2.8 Kerangka Berpikir**

### **2.8.1 Hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB**

Pada dasarnya pembangunan ekonomi di suatu daerah ataupun negara bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan output yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang terdapat pada suatu wilayah sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor tersebut pada suatu periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah. Aulia dan Ayunda (2015) pemerintah daerah harus konsisten dalam melakukan alokasi anggaran yang kemudian akan berdampak terhadap kebijakan terkait yaitu terjadinya peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan secara agregat dapat meningkatkan pendapatan perekonomian atau PDRB daerah.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Todaro dan Stephen (2004), setidaknya ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor tersebut antara lain (1) akumulasi modal, meliputi segala jenis bentuk atau investasi baru yang dialokasikan untuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia, (2) tingkat pertumbuhan penduduk, dan (3) kemajuan teknologi di suatu daerah.

Dalam konteks ini, belanja pemerintah pada belanja daerah berperan penting dalam pembentukan modal dalam pembangunan berbagai sektor seperti sarana dan prasarana umum. Dengan tersedianya fasilitas umum yang memadai, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Chengliang dan Liutang (2009) kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada prioritas belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Kenaikan pada tingkat pengeluaran pemerintah diharapkan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) sehingga kenaikan pertumbuhan PDRB akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan, baik di pusat maupun daerah.

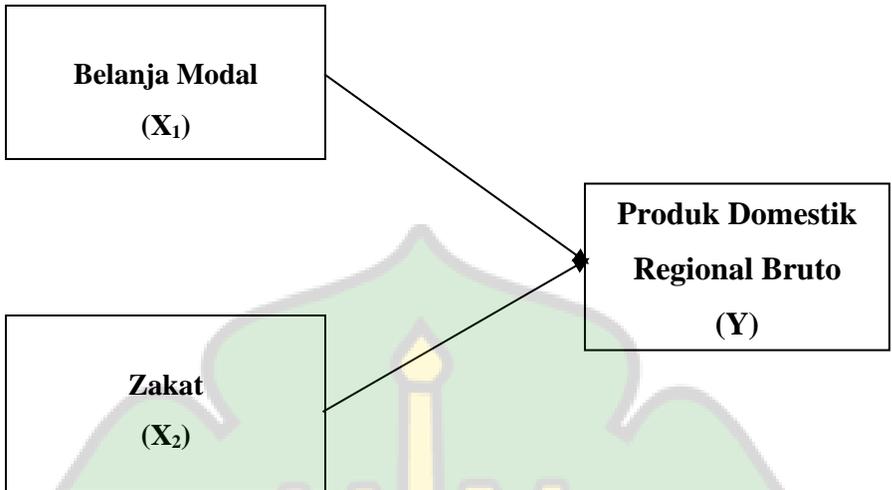
### **2.8.2 Hubungan antara Zakat dengan PDRB**

Secara umum zakat sangat erat hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini terbukti di zaman Rasulullah dimana zakat merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Hal ini dikarenakan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan, membangun indeks pembangunan manusia, menciptakan kemandirian dan lain sebagainya. Selain itu zakat juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dimana itu menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Disinilah penting nya peran zakat terhadap kemiskinan dimana dengan adanya zakat maka akan membantu orang-orang kekurangan dalam menuju kehidupan yang

lebih baik kedepannya sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Dalam ekonomi Islam zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu dalam hal membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam melihat zakat dapat menjadi instrumen yang baik untuk memastikan terjadinya keseimbangan terhadap tingkat pendapatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa memperoleh pendapatan yang cukup dalam hal memnuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan sebagian mereka merupakan golongan fakir maupun miskin sehingga harus diperhatikan dan diberikan bantuan. Oleh karena itu, zakat memegang peranan penting bagi umat Islam untuk membuat distribusi pendapatan lebih merata. Dengan diterapkan kebijakan zakat, mereka yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperan dalam kehidupan mereka dan dapat memenuhi kewajiban mereka kepada Allah. Dengan zakat, kaum fakir miskin juga merasa menjadi bagian dari masyarakat karena merasa dihargai karena yang berzakat memiliki empati kepada mereka (Atabik, 2015).

Penelitian ini ingin menganalisis tentang pengaruh belanja modal dan zakat terhadap pertumbuhan PDRB di aceh dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



## 2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan hasil penelitian terkait (terdahulu) dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka yang yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
  - $H_0$  : Tidak ada pengaruh Belanja Modal ( $X_1$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )
  - $H_1$  : Ada pengaruh Belanja Modal ( $X_1$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )
  
2. Pengaruh Zakat terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
  - $H_0$  : Tidak ada pengaruh Zakat ( $X_2$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )
  - $H_1$  : Ada pengaruh Zakat ( $X_2$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )
  
3. Pengaruh Belanja Modal dan Zakat secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$H_0$  : Tidak ada pengaruh Belanja Modal dan Zakat secara bersama-sama terhadap PDRB

$H_1$  : Ada pengaruh Belanja Modal dan Zakat secara bersama-sama terhadap PDRB



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif. Metode penelitiannya menggunakan pengukuran yang terstandar atau menggunakan skala pengukuran data sehingga secara esensial penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang pengumpulan data numerik untuk menjelaskan fenomena tertentu. Wijayanti et al., (2021:11) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah, sedangkan Arikunto (2013:27) menjelaskan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan banyak angka untuk memperoleh hasil tertentu. Penelitian kuantitatif menekankan pada analisis data numerik atau angka yang diperoleh dengan menggunakan metode statistik yang berlaku, dan studi penalaran dalam menguji hipotesis penelitian, sehingga menghasilkan hasil yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Primer**

Wijayanti et al., (2021:72) menyatakan data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dengan kata lain data

primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Data ini dapat berasal dari wawancara maupun survei yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara atau sering juga disebut dengan interview merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Nur Indrianto dan Bambang Suporno (2013:142) mengatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dan digali secara langsung dari sumber utamanya tanpa perantara. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Wijayanti et al., 2021:72). Hasan (2002:58) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber baik itu buku, jurnal, hasil publikasi pemerintah, Badan pusat statistik maupun sumber-sumber terpercaya lainnya.

Data dalam penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di aceh yang berasal dari buku-buku publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK) Kemenkeu, Baitul mal, Jurnal, dan hasil publikasi Pemerintah Aceh. Data panel merupakan data yang terdiri dari kombinasi data time series dan data cross-section. Dengan kata lain, data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Nuryanto dan Pambuko, 2018). Data yang digunakan adalah sampel dari tahun 2016-2020 dari belanja modal, zakat dan PDRB.

### **3.3 Definisi dan Operasional Variabel**

Sugiyono (2018:38) menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi mengenai suatu hal tersebut dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan akhirnya. Wijayanti et al., (2021:42) operasional variabel menjelaskan bagaimana sebuah variabel akan diperasionalkan atau diketahui nilainya pada penelitian. Operasional variabel yang digunakan harus selaras dengan konseptual yang dijelaskan sebelumnya. Pada penelitian ini variabel bebas (Independen) yang digunakan adalah belanja modal dan zakat, sedangkan varibel terikat (Dependen) pada penelitian ini adalah produk domestik regional bruto.

Untuk lebih mudah untuk memahami penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut ini diberikan deskripsi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Deskripsi Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Satuan</b>
PDRB (Y)	Pertumbuhan Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik (BPS, 2021).	$PDB_t = PDB_0(1+r)^t$  (BPS, 2021)	Rupiah
Belanja Modal (X <sub>1</sub> )	pengeluaran yang dianggarkan untuk aset tetap berwujud yang dapat memperoleh manfaat dari lebih dari satu periode akuntansi (Rekanaharto, 2013).	Realisasi seluruh Belanja Modal (PP No. 71 Tahun 2010).	Rupiah
Zakat (X <sub>2</sub> )	zakat merupakan harta yg harus dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam ataupun badan usaha untuk diserahkan kepada yg berhak menerimanya (sinkron) dengan ketentuan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).	Realisasi penerimaan seluruh zakat (Baitul Mal Aceh, 2022)	Rupiah

Sumber: Data diolah (2022)

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda dengan data panel atau data gabungan time series dan juga cross section. Wijayanti et al., (2021:113) data time series merupakan data runtut waktu, sedangkan cross section merupakan data silang. Dengan demikian data panel merupakan data kombinasi antara data runtut waktu (time-series) yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat (cross-section) yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada suatu titik tertentu.

### **3.5 Analisis Regresi Linear Berganda**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode untuk menguji teori-toeri tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Sugiyono (2018:277) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan mengenai keadaan variabel. Dengan kata lain analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas (Independen) dalam suatu penelitian dengan variabel terikat (Dependen), sedangkan Siregar (2014:277) berpendapat bahwa metode analisis data dengan analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linier sederhana yang sama-sama berfungsi untuk mengukur pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel sehingga model regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Produk Domestik Regional Bruto
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2$	= Koefesien variabel independen
$X_1$	= Belanja Modal
$X_2$	= Zakat
$e$	= Error

Dalam meregresi estimasi data panel dapat melalui tiga teknik model pendekatan, yaitu :

1. *Common Effect Model*
2. *Fixed Effect Model*
3. *Random Effect Model*

### 3.5.1 Common Effect (CEM)

*Common effect model* (CEM) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*, atau sering disebut juga dengan estimasi CEM atau *pooled least square*. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, disebut juga *Pooled Regression*. Metode estimasinya menggunakan *Ordinary Least Squares* (Robinson, 2021:1). Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan *data cross section* atau *time series*. Akan tetapi Eko (2017:3) akan tetapi, untuk data panel sebelum membuat regresi data harus digabungkan terlebih dahulu yaitu data *cross-*

*section* dengan data *time series*. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Akan tetapi, dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu. Atau dengan kata lain, dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.

### **3.5.2 Fixed Effect (FEM)**

Model ini mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, karakteristik masing-masing individu adalah berbeda. Perbedaan tersebut dicerminkan oleh nilai intersep pada model estimasi yang berbeda untuk setiap individu (Robinson, 2021:2). Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Eko (2017:6) menjelaskan bahwa pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengasumsikan bahwa intercep dan koefisien regresor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section atau unit time series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit cross section maupun unit time series. Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variabel dummy ini dikenal juga dengan Least Square Dummy Variable (LSDV) atau juga disebut covariance model.

### 3.5.3 Random Effect (REM)

Metode *Random Effects* adalah model yang digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini juga mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, karakteristik masing-masing individu adalah berbeda. Hanya saja, dalam REM perbedaan tersebut dicerminkan oleh error dari model (Robinson, 2021:2). Dalam mengestimasi data panel dengan model *fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel residual yang dikenal dengan model REM (Eko, 2017:8).

## 3.6 Uji Spesifikasi Model

### 3.6.1. Uji Chow

Robinson (2021:3) menyatakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan menambahkan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F. Uji ini digunakan untuk Untuk memilih model mana yang lebih cocok antara Common Effects ataukah Fixed Effects. Eko (2017:10) menjelaskan uji chow digunakan untuk memilih kedua model diantara Model *Common Effect* dan Model *Fixed Effect*. Asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkannya setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda menjadi dasar dari uji chow. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$  : Metode efek umum (CEM)

$H_1$ : Metode efek tetap (FEM)

Jika p-value bagian chi-square  $< 5\%$ , atau nilai probabilitas (p-value) uji F  $< 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak atau metode yang digunakan dapat dikatakan metode efek tetap (FEM). Jika nilai p-nilai chi-square  $> 5\%$ , atau nilai probabilitas uji-F  $> 5\%$ , maka  $H_0$  terima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode yang umum metode efek.

### 3.6.2. Uji Hausman

Untuk memilih model mana yang lebih cocok antara *Fixed Effects* ataukah *Random Effects*, dapat digunakan Uji Hausman (Robinson, 2021:4). Uji Hausman ini didasarkan pada ide *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien, sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Eko (2017:11) menjelaskan uji hausman digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random effect*. Alasan dilakukannya uji hausman didasarkan pada model *fixed effect* model yang mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy dan model *Random Effect* yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Jika  $H_0$  ditolak, maka penarikan kesimpulan harus menggunakan FEM. Karena REM kemungkinan besar berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Sebaliknya jika  $H_a$  ditolak maka model yang akan digunakan adalah REM.

### **3.7 Uji Asumsi Klasik**

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang wajib dipenuhi dalam membentuk estimasi yg baik atau dikenal menggunakan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Tujuan pengujian perkiraan klasik adalah untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan mempunyai ketepatan pada perkiraan, tidak bias dan konsisten. asumsi-asumsi dasar tadi meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

#### **3.7.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Purnomo, 2017:17). Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual memiliki data terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic.

Hafni (2021:69) mengatakan bahwa metode uji normalitas adalah metode yang dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak..

Deteksi dengan memeriksa asimtotik *JarqueBera* (sampel besar, berdasarkan residual kuadrat terkecil normal). Tes ini adalah dengan mempertimbangkan probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut :

Bila probabilitas  $> 0,05$  maka signifikan,  $H_0$  diterima

Bila probabilitas  $< 0,05$  maka tidak signifikan,  $H_0$  ditolak

### **3.7.2 Uji Multikolinieritas**

Salah satu syarat untuk memakai analisis dengan menggunakan regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji multikolinieritas yaitu hubungan sesama variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi sesama variabel bebas. Uji Multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas (Hafni, 2021:70). Pengujian ini membantu menentukan apakah model regresi telah mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik adalah model yang tidak ada korelasi antara variabel independen. Gujarati (2013:213) menyatakan koefisien korelasi  $> 0,8$  antara variabel independen menunjukkan masalah multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika nilai koefisien korelasi  $< 0,8$  maka model tidak memiliki multikolinieritas.

### **3.7.3. Uji Heterokedastisitas**

Hafni (2021:69) menyatakan uji heterokedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji ini bertujuan untuk menguji

apakah terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadinya heteroskedastisitas. Winarno (2015:57) menyatakan uji ini dilakukan dengan cara regresi masing-masing variabel independen dengan residual absolut sebagai variabel dependen. Residual adalah perbedaan antara nilai yang diamati dan diprediksi, dan nilai absolut adalah nilai mutlak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolut dari residual variabel independen. Jika tingkat kepercayaan hasil uji Glejser  $> 0,05$  maka tidak terdapat varians yang tidak seragam.

### **3.8 Uji Hipotesis**

#### **3.8.1 Uji Parsial (Uji T)**

Hafni (2021:53) Uji parsial atau uji t merupakan pengujian yang dilakukan terhadap koefisien regresi secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Priadana dan Muis (2009:187) menjelaskan bahwa uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk hipotesis alternatif nya ( $H_a$ ) maka parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat , yaitu pengaruh masing-masing variabel bebas seperti belanja modal dan zakat terhadap PDRB Aceh sebagai variabel terikat. Pengujian ini dijalankan pada dengan hipotesis berikut memperhitungkan t hitung.

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

- 1) Jika nilai signifikan  $t_{hitung} < 0,05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sehingga  $H_0$  ditolak.
- 2) Jika nilai signifikan  $t_{hitung} > 0,05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga  $H_0$  diterima.

### **3.8.2 Uji Simultan (Uji F)**

Hafni (2021:53) berpendapat bahwa Uji F ini dilakukan untuk mengenali apakah terdapat atau tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel bebas bukan

merupakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatif nya ( $H_a$ ), tidak semua variabel secara simultan sama dengan nol (Priadana dan Muis, 2009:189). Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 (5%).

1) Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

2) Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

### **3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi sering disimbolkan dengan  $R^2$ , yang pada prinsipnya bertujuan untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat (Hafni, 2021:54). Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui persentase variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ )

memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 1 menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sujarweni, 2015: 164).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan melihat nilai PDRB secara konstan dari suatu daerah mengalami kenaikan atau pun penurunan. Kenaikan nilai PDRB suatu daerah merupakan indikasi bertumbuhnya ekonomi suatu daerah ke arah yang positif yang berarti suatu daerah mengalami pertumbuhan secara ekonomi sehingga kebijakan yang telah direncanakan untuk membuat ekonomi bertumbuh berjalan dengan lancar. Namun disisi lain pertumbuhan PDRB ini juga bisa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mengganggu rencana yang telah disusun oleh pemerintah yang kemudian berakibat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi minus.

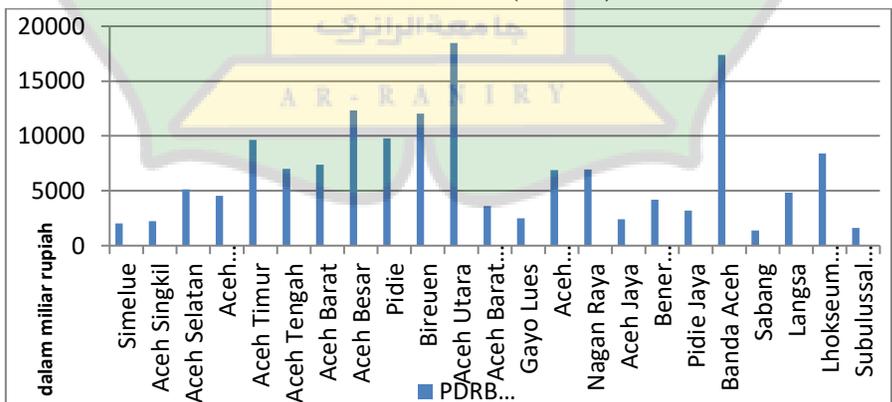
Oleh sebab itu pemerintah setiap tahun harus menyusun strategi yang bisa membuat ekonomi daerah bisa tumbuh ke arah yang positif melalui berbagai kebijakan baik itu pengeluaran maupun penerimaan sehingga nilai PDRB bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB adalah belanja modal, sedangkan salah satu penerimaan atau pun pendapatan daerah yang fungsinya sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu penerimaan zakat. Untuk lebih jelasnya akan

dibahas terlebih dahulu mengenai gambaran tentang variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal dan zakat.

#### 4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Aceh

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan pembangunan di suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam periode tertentu baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan pendapatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dari nilai PDRB pada suatu daerah sehingga di dapat hasil pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Gambar berikut akan menjelaskan rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Aceh dari hasil gabungan 23 kabupaten/kota tahun 2016 hingga 2020.

**Gambar 4.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Aceh 2016-2020**



Sumber :BPS (diolah 2022)

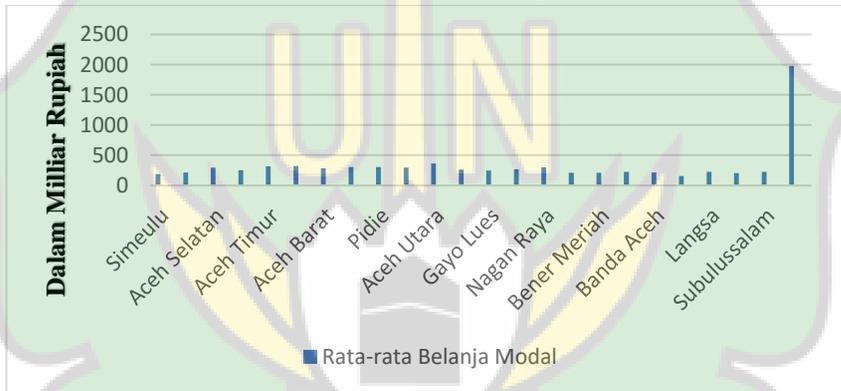
Rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Aceh tahun 2016 hingga 2020 dapat terlihat pada Gambar 4.1. Pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Aceh cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini terbukti dari nilai PDRB tiap kabupaten/kota yang selalu naik setiap tahunnya meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan. Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) tertinggi selama tahun 2016-2020 yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar Rp 16.204,51 Miliar. Tingginya PDRB kabupaten Aceh Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya produksi, pengeluaran serta pendapatan, sedangkan kabupaten/kota dengan nilai PDRB terendah yaitu kota Sabang dengan nilai PDRB rata-rata sebesar Rp 1.061,88 Miliar. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor produksi, pengeluaran, pendapatan serta jumlah penduduk dimana kota Sabang merupakan kabupaten/kota dengan tingkat jumlah penduduk paling sedikit di Aceh. Jumlah penduduk kota Sabang menurut BPS (2019) yaitu 34.874 jiwa.

#### **4.1.2 Belanja Modal di Aceh**

Belanja modal merupakan salah satu fokus pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan belanja modal bersifat investasi yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin besar jumlah dan kontribusi belanja modal diyakini dapat membuat proses pembangun menjadi lebih baik. Melalui kebijakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal, diharapkan dapat menciptakan

pembangunan ekonomi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah dan juga menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi secara bertahap sehingga infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Fajri, 2016). Adapun realisasi rata-rata belanja modal Pemerintah Aceh ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 4.2**  
**Grafik rata-rata Belanja Modal Pemerintah Aceh Tahun**  
**2016-2020 (Miliar Rupiah)**



*Sumber : Portal Data DJPK (diolah 2022)*

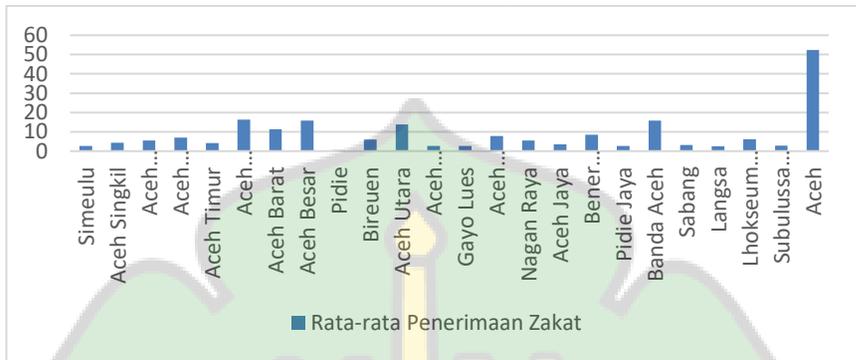
Pada Gambar 4.2 dapat terlihat realisasi belanja modal Aceh untuk 23 kabupaten/kota selama 5 tahun terakhir yang nilai rata-rata mencapai Rp 8.050, 08 miliar atau sekitar 8 triliun. Alokasi belanja modal selama 5 tahun terakhir tertinggi dialokasikan oleh kabupaten Aceh Utara yaitu dengan nilai total Rp 363,59 miliar, sedangkan nilai belanja modal Aceh dengan nilai terendah secara rata-rata dialokasikan oleh kota Sabang dengan nilai Rp 155,74 miliar. Hal ini berarti tidak ada kabupaten maupun kota di Aceh yang

mengalokasikan belanja modal yang mendekati alokasi dari Aceh secara rata-rata sebesar Rp 1.980,45 miliar. Asahdi et al., (2015) menyebutkan faktor yang menyebabkan nilai belanja modal atau pengeluaran pemerintah tidak sama setiap tahunnya yaitu jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, pertimbangan politik serta keamanan.

#### **4.1.3 Zakat di Aceh**

Zakat merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan zakat yang diterima oleh pemerintah akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa mengurangi tingkat ketimpangan diantara sesama masyarakat. Dalam islam sendiri zakat menjadi hal yang wajib dikarenakan dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Ekonomi Islam melihat instrumen zakat dapat menjadi instrument dalam memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat lebih berperan dalam kehidupannya, seperti melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan lebih baik. Dengan zakat orang fakir atau miskin akan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini dikarenakan merasa dihargai karena ada empati dari orang yang memiliki kelebihan harta (Atabik, 2015). Oleh sebab itu zakat menjadi hal yang penting sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan atau penerimaan daerah. Berikut merupakan realisasi penerimaan zakat Aceh.

**Gambar 4.3**  
**Grafik Penerimaan Zakat Pemerintah Aceh Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)**



*Sumber : Baitul Mal Aceh (diolah 2022)*

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat realisasi penerimaan zakat untuk Aceh untuk 23 kabupaten/kota. Selama 5 tahun terakhir, kota Banda Aceh menjadi kota dengan penyumbang zakat terbesar secara rata-rata yaitu dengan nilai Rp 15,85 milliar, sedangkan kabupaten pidie menjadi penyumbang zakat dengan nilai terendah selama 5 tahun terakhir yaitu dengan nilai Rp 508 juta. Hal ini berarti dari 23 kabupaten/kota belum ada yang bisa melewati penerimaan zakat dari Aceh secara rata-rata yang mencapai nilai Rp 52,3 milliar. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat adalah keimanan, penghargaan, kepuasan, organisasi, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan ( Syauqi, 2012).

### 4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai variabel penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel dalam penelitian. Hasil analisis

statistik yang diperoleh pada penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>PDRB</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Zakat</b>
<b>Mean</b>	5.414,79	255,51	6,59
<b>Median</b>	4.068,95	243,81	5,54
<b>Max</b>	17.015,45	512,06	18,67
<b>Min</b>	957,29	100,76	0,25
<b>Std. Dev</b>	3.999,96	87,08	4,85
<b>Observation</b>	115	115	115

*Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)*

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dalam penelitian ini data yang digunakan berjumlah 115 sampel yang diperoleh dari BPS, DJPK Kemenkeu dan Baitul Mal tahun 2016-2020 dengan fokus penelitian di Aceh. Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Mean untuk variabel PDRB yaitu Rp 5.414,79 miliar, belanja modal Rp 255,51 miliar dan zakat Rp 6,59 miliar.
2. Nilai median untuk variabel PDRB yaitu Rp 4.068,95 miliar, belanja modal Rp 243,81 miliar dan zakat Rp 5,54 miliar.
3. Nilai Max untuk variabel PDRB yaitu Rp 17.015,45 miliar, belanja modal Rp 512,06 miliar dan zakat Rp 18,67 miliar.

4. Nilai Min untuk variabel PDRB yaitu Rp 957,29 miliar, belanja modal Rp 100,76 miliar dan zakat Rp 0,25 miliar atau Rp 250 juta.
5. Nilai Std. Dev untuk variabel PDRB yaitu Rp 3.999,96 miliar, belanja modal Rp 87,08 miliar dan zakat Rp 4,85 miliar.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

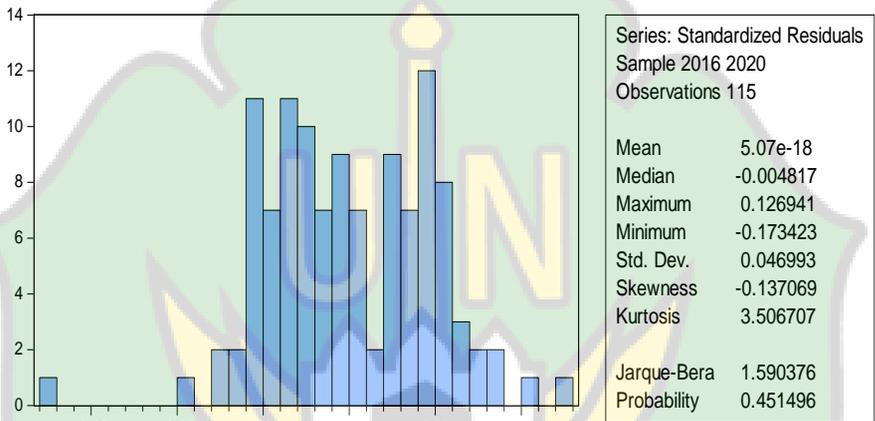
Uji Asumsi Klasik atau kualitas data merupakan suatu pengujian asumsi klasik yang harus dilakukan dan bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang di estimasi dapat digunakan serta memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Berikut merupakan hasil dari uji asumsi klasik

#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data residual dari model regresi yang dibentuk menghasilkan distribusi normal atau tidak normal. Hasil estimasi model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas data menggunakan *eviews* dapat dilakukan dengan uji *Jarque-bera*. *Jarque-bera Test* merupakan uji statistic untuk mengetahui apakah data menghasilkan distribusi normal atau tidak. Gujarati (2013) Menyatakan deteksi menggunakan *Jarque Bera* merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas hasil *residual Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas nilai *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- a. Bila nilai probabilitas JB  $> 0,05$  maka data menghasilkan distribusi normal
- b. Bila nilai probabilitas JB  $< 0,05$  maka data menghasilkan tidak distribusi normal

**Gambar 4.4**  
**Uji Normalitas**



*Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)*

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat nilai Jarque-bera yaitu 1,590376 dengan nilai probability sebesar 0,451496. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai probability 0,451496 lebih besar dari 0,05.

### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ini ditemukan terjadinya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadinya korelasi antar variabel bebasnya (independen). Gujarati (2013) menjelaskan jika nilai koefesien korelasi

antarvariabel bebas  $> 0,8$  dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas, sedangkan jika koefesien korelasi  $< 0,8$  maka model terbebas dari multikolinearitas.

**Tabel 4.2**  
**Uji Multikolinearitas**

	LOG (PDRB)	LOG (Belanja Modal)	LOG (Zakat)
LOG (PDRB)	1,000000	0,354804	0,470032
LOG (Belanja Modal)	0,354804	1,000000	0,057617
LOG (Zakat)	0,470032	0,057617	1,000000

*Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)*

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas dimana nilai koefesien antarvariabel berada dibawah 0.8. nilai korelasi yang berada dibawah 0.8 mengindikasikan bahwa tidak terjadinya korelasi antara variabel bebas. Artinya, pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variable independent sehingga model persamaan regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini

#### **4.3.3 Uji Heterokedastisitas**

Uji ini dilakukan yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lainnya. Model yang baik yaitu yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadinya heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser dimana jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser  $> 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.3**  
**Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	1,214451	Prob. F(2,112)	0,3008
Obs*R-squared	2,441024	Prob. Chi-Square(2)	0,2951
Scaled explained SS	2,319747	Prob. Chi-Square(2)	0,3135

sumber : *Eviews 10 (Diolah 2022)*

pada Tabel 4.3 menampilkan hasil dari uji heterokedastisitas dimana nilai probability dari Obs\*R-squared menunjukkan nilai sebesar 0,2951 dimana lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan uji glejser yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan nilai prob  $0,2951 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model ini.

#### 4.4 Pengujian Model

Pengujian model dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara 3 model model yaitu *common effect*, *fixed effect model* maupun *random effect model*. Berikut hasil

pengujian Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model estimasi regresi:

#### 4.4.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menguji ataupun menentukan model yang tepat antara *common effect* atau pun *fixed effect*. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas chi-square  $< 0,05$  maka yang dipilih adalah model *fixed effect*.
- b. Apabila nilai probabilitas chi-square  $< 0,05$  maka yang dipilih adalah model *common effect*.

Apabila dari hasil uji chow menunjukkan bahwa model *fixed* yang dipilih, maka harus melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuuk menentukan model yang lebih tepat antara *fixed* dan *random effect*. Berikut merupakan hasil dari uji chow yang telah dilakukan:

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: MODEL\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	713,880749	(22,90)	0,0000
Cross-section Chi-square	594,281231	22	0,0000

Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)

Hasil pada Gambar 4.5 menunjukkan nilai prob dari chi-square sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini digunakan *fixed effect*.

#### 4.4.2 Uji Hausman

Dikarenakan pada uji chow (sebelumnya) yang dipilih yaitu menggunakan model *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji hausman sebagai uji lanjutan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *fixed* dan *random effect*. Berikut merupakan hasil uji hausman yang telah dilakukan:

**Gambar 4.6**  
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MODEL\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23,628045	2	0,0000

Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)

Untuk melihat hasil pada uji hausman dapat dilihat pada nilai prob. chisquare. Apabila nilai probabilitas chi-square  $< 0,05$  maka model yang digunakan yaitu model *fixed effect*, namun sebaliknya apabila jika nilai prob. chi-square  $> 0,05$  maka yang digunakan adalah model *random effect*. Berdasarkan Gambar 4.6 hasil uji hausman diperoleh nilai prob. Chisquare  $0,0000 < 0,05$  yang berarti model yang digunakan *fixed effect*.

#### 4.5 Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara pengaruh sebab akibat antar variabel yang dianalisis berdasarkan data selang waktu dan silang. Analisis

regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh dari belanja modal dan zakat terhadap produk domestik regional bruto. Analisis regresi pada estimasi data panel dapat dilakukan dengan tiga model analisis yaitu *Common*, *Fixed* dan juga *Random effect*. Pemilihan model regresi dilakukan dengan cara pemenuhan syarat pengolahan data statistik yang benar dan sesuai sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara statistik. Oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menentukan model yang tepat diantara ketiga model analisis tersebut. Setelah dilakukan pengujian uji chow dan uji hausman untuk menentukan model yang tepat untuk digunakan, maka model yang terpilih ada model *fixed effect*. Berikut hasil *fixed effect model* yang telah analisis :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Regresi Linear Model *Fixed Effect***

Variable	Koefisien	Std. Error
C	8.650483	0,109935
Belanja Modal	-0,071094	0,017654
Zakat	0,041374	0,021214

*Sumber : Eviews 10 (diolah 2022)*

Berdasarkan hasil dari koefisien regresi yang diperoleh dari Tabel 4.4 diatas maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8.650 - 0,071 X_1 + 0,041 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Produk domestik regional bruto

$X_1$  = belanja modal

$X_2$  = zakat

$e$  = error

Adapun interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. apabila jika nilai variabel belanja modal dan zakat dianggap konstan = 0, maka nilai dari produk domestik regional bruto Aceh adalah sebesar 8.650
2. nilai koefisien  $X_1$  untuk variabel belanja modal adalah -0,071 dan bertanda negatif yang berarti menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang berlawanan arah. Artinya apabila nilai belanja modal naik sebesar 1 % maka akan menurunkan nilai produk domestik regional bruto aceh sebesar -0,071 %. Begitu pula sebaliknya, jika nilai belanja modal turun sebesar 1 % maka akan meningkatkan nilai produk domestik regional bruto Aceh sebesar 0,071 % dengan asumsi variabel bebas lain dalam model regresi tetap.
3. nilai koefisien  $X_2$  untuk variabel zakat adalah 0,041 % dan bertanda positif yang berarti menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang searah. Artinya apabila nilai zakat naik sebesar 1 % maka akan menaikkan nilai produk domestik regional bruto aceh sebesar 0,041. Begitu pula sebaliknya, jika nilai penerimaan zakat turun sebesar 1 % maka akan menurunkan nilai produk domestik regional bruto Aceh sebesar 0,041 % dengan asumsi variabel bebas lain dalam model regresi tetap.

#### 4.6 Uji Signifikansi Model

Uji signifikansi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi Uji F, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi. Berikut ini adalah tabel dari hasil estimasi Ordinary least square:

**Tabel 4.5**  
**Hasil estimasi panel least square**

Variabel	t-statistic	Probability	Keterangan
C	78,68749	0,0000	Signifikan
Belanja Modal	-4,026996	0,0001	Signifikan
Zakat	1,950374	0,0542	Signifikan
Prob F-statistic	0,000000		Signifikan
Adjusted R-Squared	0,995155		
Jumlah Observasi	115		

Sumber : *Output eviews 10 (Diolah)*

##### 4.6.1 Uji F Simultan

Uji F merupakan suatu pengujian untuk melihat secara keseluruhan apakah variabel independen belanja modal, dana alokasi umum dan zakat memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen yaitu produk domestik regional bruto. Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi secara simultan terlihat

bahwa nilai P-Value = 0,000000 <  $\alpha$  (0,05) yang memberikan keputusan menolak  $H_0$ . Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama antara belanja modal dan zakat terhadap produk domestik regional bruto di Aceh.

#### 4.6.2 Uji T

1.  $H_0$  : Diduga tidak terdapat Pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$H_1$  : Diduga terdapat Pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi dari koefisien  $\beta_1 = 0,0000 < \alpha$  (0,05) yang memberikan keputusan menolak  $H_0$  dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja modal terhadap produk domestik regional bruto di Aceh

2.  $H_0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$H_2$  : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi dari koefisien  $\beta_2 = 0,0542$  atau sama dengan  $\alpha$  (0,05) yang memberikan keputusan menolak  $H_0$  dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari zakat terhadap produk domestik regional bruto di Aceh.

### **4.6.3 Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi digunakan dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan variabel-variabel independen (bebas) secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen (terikat). Untuk mengukur analisis variabel linear berganda atau lebih dari 1 variabel digunakan nilai dari Adjusted R Square sebagai indikator pengukur. Berdasarkan pada Tabel 4.5 diketahui bahwa variabel independent (terikat) pada penelitian ini yaitu belanja modal dan zakat secara bersama-sama dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam skala produk domestik regional bruto yang ditunjukkan oleh nilai  $d$ justed R-squared. Nilai adjusted R-squared antara belanja modal dan zakat yaitu sebesar 0,99. Artinya pertumbuhan ekonomi (PDRB) mampu dijelaskan oleh variabel belanja modal dan zakat sebesar 99%. Menurut (Chin, 1998) nilai R-Square dikategorikan kuat apabila lebih dari 0,67 , moderat 0,377 sampai 0,67 dan lemah jika lebih dari 0,19 sampai dengan 0,33. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan kuat antara belanja modal dan zakat terhadap PDRB.

### **4.7 Pembahasan Penelitian**

Pada bab pembahasan ini akan dibahas pengaruh belanja modal dan zakat terhadap produk domestik regional bruto yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **4.7.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Aceh. Hal ini diperoleh dari nilai P-value sebesar  $0,0001 < \alpha = 0,05$ . Dari persamaan regresi berganda diketahui bahwa variabel belanja modal memiliki koefisiensi sebesar -0,07. Artinya, peningkatan belanja modal tidak terlalu berdampak terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2016) yang menyatakan bahwa Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera.

Belanja modal pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan manfaat dari aset tetap yang didapatkan dari hasil pengeluaran anggaran pemerintah daerah. Adanya kebijakan alokasi anggaran ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat menambah nilai dari dari sektor perekonomian. Akan tetapi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah menunjukkan hasil yang bertolak belakang dimana belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Aceh. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Ditinjau dari sisi ekonomi Islam, kebijakan alokasi anggaran memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan Islam menganggap infrastruktur merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi umat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam alokasi kebijakan fiskal, Islam selalu mengutamakan belanja yang membawa manfaat banyak bagi masyarakat luas. Hal ini untuk menghindari alokasi dana yang tidak terdapat sasaran sehingga tidak menghasilkan manfaat bagi umat. Dengan memprioritaskan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan meningkat (Jajang et al., 2021).

Secara umum, para tokoh islam telah memberikan kaidah umum dalam menentukan kebijakan belanja pemerintah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist (Nasution, 2006). Kaidah tersebut diantaranya adalah:

1. Pengeluaran belanja oleh pemerintah harus memperhatikan masalah.
2. Mendahulukan kebijakan yang bersifat menghindari kesulitan dan mudharat daripada melakukan pembenahan.
3. Memperhatikan kaidah al-ghunm bi al-ghurm, yaitu bersama manfaat ada resiko yang harus ditanggung.
4. kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan

#### **4.7.2 Pengaruh Zakat terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Aceh. Hal ini diperoleh dari nilai P-value sebesar  $0,0542 = 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, peningkatan penerimaan zakat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto. Dari persamaan regresi berganda diketahui bahwa variabel zakat memiliki koefisiensi sebesar 0,04. peningkatan penerimaan zakat berdampak positif terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2020) yang menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Purwanti, 2020) yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi perekonomian suatu negara maupun daerah untuk lebih meningkatkan penerimaan zakat sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Aceh baik oleh individu perorangan maupun lembaga/kelompok.

Salah satu upaya dalam memaksimalkan potensi zakat di Aceh yaitu dengan keberadaan Baitul Mal Aceh yang bertugas dalam hal menerima maupun mendistribusikan zakat. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan mengutus Ali bin Abi Thalib ke yaman untuk menjadi amil zakat. Begitu pula yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau sesudahnya dimana mereka selalu mempunyai petugas yang mengelola tentang zakat (Hafidhuddin, 2008).

Dalam ekonomi Islam zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memegang peranan penting dan manfaat besar dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan manusia. Hal ini terbukti dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam sehingga menegaskan pentingnya zakat dalam pandangan Islam terhadap kesejahteraan manusia (Hafidhuddin dan Pramulya, 2008).

Pengaruh zakat secara ekonomis yaitu berdampak terhadap produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat terhadap produksi artinya zakat dapat membantu fakir miskin dalam mencukupi kebutuhan primernya atau kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Hal ini tentunya merupakan hak semua manusia untuk hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Untuk segi investasi akan mendorong manusia untuk melakukan investasi yang mereka bisa dengan memaksimalkan zakat yang telah diterima yang kemudian akan berdampak terhadap tumbuhnya perekonomian baik itu dari segi produksi maupun konsumsi sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan ikut meningkat.

Islam memandang kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat membahayakan bagi seseorang dimana dapat berakibat terhadap aqidah, akhlak, perilaku masyarakat dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat membuat orang lupa kepada nikmat Allah yang lain sehingga berpotensi membuat seorang muslim menuju kefakiran dimana kefakiran identik dengan kekafiran. Hal ini dikarenakan orang fakir miskin akan muncul benih keraguan dalam dirinya dan membuat dirinya berfikir terhadap ketidakadilan dalam pembagian rezeki oleh Allah (Hafidhuddin, 1998).

Zakat berperan dalam bidang ekonomi untuk meminimalisir penumpukkan kekayaan hanya di kelompok tertentu saja sehingga dengan wajibnya zakat orang yang memiliki kelebihan dari segi ekonomi akan mendistribusikan kekayaannya kepada kelompok yang kurang mampu (Rozalinda, 2014). Dalam konteks keuangan, zakat menjadi salah satu penerimaan negara. Oleh karenanya zakat harus masuk kedalam prioritas kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak. Jika hal ini dilakukan justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara maupun daerah dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat sehingga potensi zakat dapat lebih dimaksimalkan.

#### **4.7.3 Pengaruh Belanja Modal dan Zakat terhadap PDRB dalam tinjauan Ekonomi Islam**

Secara umum, belanja modal ( $X_1$ ) dan zakat ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh angka signifikansi sebesar  $0,00000 < 0,05$  yang menunjukkan indikasi bahwa belanja modal dan zakat memegang peranan penting terhadap pengaruh dari produk domestik regional bruto di Aceh. Ditinjau dari konsep ekonomi Islam, belanja dan zakat merupakan bagian dari kebijakan ekonomi fiskal Islam. Ekonomi Islam memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur dan juga mengendalikan perilaku manusia melalui insentif yang diberikan yang diperoleh dari pendapatan pemerintah seperti zakat atau pun sumber penerimaan yang lain. Kebijakan fiskal didalam Islam pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang didalamnya terdapat distribusi kekayaan yang seimbang dengan tetap memperhatikan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dengan adanya distribusi yang merata, hal ini akan membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dalam hal konsumsi maupun produksi nantinya sehingga secara perlahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya belanja yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal ini belanja modal akan memberikan manfaat bagi daerah berupa perolehan aset

tetap. Aset tetap atau belanja modal yang telah dialokasikan oleh pemerintah selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan daerah atau pun masyarakat seperti pembangunan jalan, gedung, jaringan dan lain sebagainya sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan mudahnya akses baik itu akses transportasi maupun informasi maka akan meningkatkan tingkat konsumsi di masyarakat sehingga nantinya akan meningkatkan produk domestik regional bruto di Aceh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan hasil penelitian pengaruh belanja modal dan zakat terhadap produk domestik regional bruto di Aceh dalam perspektif ekonomi Islam dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara simultan belanja modal dan zakat berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Aceh.
2. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa:
  - a. variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto di Aceh.
  - b. Variabel Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto di Aceh.

#### **5.2 Saran**

1. Disarankan agar pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja modal untuk lebih memperhatikan dampak kebijakan secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pengadaan fasilitas umum yang memadai, pembangunan

infrastruktur secara merata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.

2. Disarankan agar pemerintah daerah dapat lebih memaksimalkan potensi zakat di Aceh dengan cara benar-benar memperhatikan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat sehingga penerimaan zakat dapat menjadi lebih besar yang nantinya distribusi zakat kepada orang yang membutuhkan (mustahik) bisa lebih merata sehingga secara langsung maupun tidak langsung bisa memperbaiki dan mendongkrak kondisi perekonomian di Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Agustin, Leny. (2020). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas. Vol. 1 No. 2
- Ahsadi,. Hamzah, A., & Musnadi, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. DOAJ. Vol.3, No.2
- Ali, Rama. (2013). Pembangunan Ekonomi dalam tinjauan Maqashid Syariah. Vol. 36, No.1
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Volume 1, Nomor 2
- Al-Qardhawi Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Andriani, Indria . (2017). *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak / Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarbaru*. Skripsi Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta :Rineka Cipta
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat dalam Pengetasan Kemiskinan. *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2

- Aulia, Rahman, Yozi. & Ayunda Lintang Chamelia. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol 8, No 1
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Indikator Ekonomi Provinsi Lampung*.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Aceh dalam angka tahun 2021*. BPS : Aceh
- Chengliang, Yan. & Gong Liutang. (2009). Government Expenditure , Taxation and Long- Run Growth. *Frontiers of Economics in China* Vol 4(4)
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Aproach to Stuctural Equation Modeling. *Modern Methods for business Research*
- Cindy,Pangestu, Eka. (2018). Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP*. Vol. 1 No. 1
- Dharma, Putra. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014. *USU : Sumatera Utara*
- DJPK Kemenkeu. (2007). Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007. Jakarta : DJPK

- Eko, Caraka, Rezzy. (2017). *Spatial Data Panel*. Jawa Timur : Wade Group
- Fajri, Ahmad. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Jambi : *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 5. No.1
- Ghozali & Ratmono (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2016). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, Damodar, N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika 3rd Edition*. New York, Mc Graw Hill. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar, N. dan Porter, Dawn. 2013. *Dasar – dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1 (Basic Econometrics)* Salemba Empat: Jakarta
- Gusti, Agung, Ayu, Prami, Saraswati, I. dan Arka, Sudarsana. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Tingkat

- Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.5, No.11
- Habiburrahman. (2012). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 3 No.1
- Hafidhuddin, Didin dan Pramulya, Rahmat. (2008). *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani
- Hafni, Sahir, Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur : KBM Indonesia
- Halim, Abdul. (2004). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hartono, Rudi. Busari, Arfiah. & Awaluddin, Muhammad. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja. INOVASI, 14 (1) 2018, 36-43
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hendry, Sulaiman, Nasution. (2010). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional

- Bruto era Desentralisasi Fiskal di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. *Media Ekonomi* Vol 18 No 2 Agustus.
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economic and Economic Education*
- Kahf, Monzer (1998): *Public Finance and Fiscal Policy in Islam*, dalam Monzer Kahf (ed.), *Lessons in Islamic Economic*, Qeddah: IDB-IRTI.
- Karim, Adiwarmanto, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto, A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Suparmoko. (1997). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Munandar, A. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. *Ekonomi Global Masa Kini* جامعة الرازي
- Murtadho, Ali. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis. Vol. IV. Edisi 1
- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

- Nordiawan, Deddi. (2006), *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Fajar. dan Rohman, Abdul. (2012) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*. Volume 1, Nomor 2
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisa Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Nyoman, Astrayasa, Putra, I dan Nyoman, Mahaendra, Yasa, I. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.8.No.12
- Priadana, M. S., & Muis, S. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponogoro: CV. WADE GROUP.
- Purwanti, Dewi. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(01), 101-107
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putu, Sri, Eka, Lestari, Ni. dan Made, Kembar, Sri, Budhi. (2014). Pengaruh Pad, Belanja Modal Dan Angkatan Kerja Terhadap PDRB. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 3, No. 12

- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat Studi Kontemporer Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Mizani
- Rahma, Ade. (2020). Analisis Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara periode 2016-2018. Universitas Islam Sumatera Utara
- Rantebua, Sem. (2020). Analisi Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kendari: *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* Volume 5, Nomor 1. Tahun 2020
- Rekanaharto, M. (2014). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Tulang Bawang tahun 2003-2012. Tesis : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Robinson, Sihombing, Pardomuan. (2021). *Statistik Multivariat Dalam Riset*. Jakarta : Widina Bhakti Persada
- Rosadi, Dedi. (2011). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan R.Yogyakarta: C. V. Andi Offset*.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadeq, Abulhasan M. (2006). *Development issues in Islam*. Kuala Lumpur: IIUM Research Center.
- Salim, Sarah Siti . (2016). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sardar, Ziauddin. (2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 5
- Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010), *Klasifikasi Belanja Modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71*
- Sudirman, Wayan. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta : Prenada Media
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015), *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru Press
- Surjaningsih, Ndari. (2012). *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi*. Jakarta : BI, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Syamsi, Ibnu. (1983). *Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Talangamin, Beatriks, Olvy,. Paulus,. Kindangen,. dan Rosalina, A.M. Koleangan.(2018), Analisis PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Vol.19 No.3

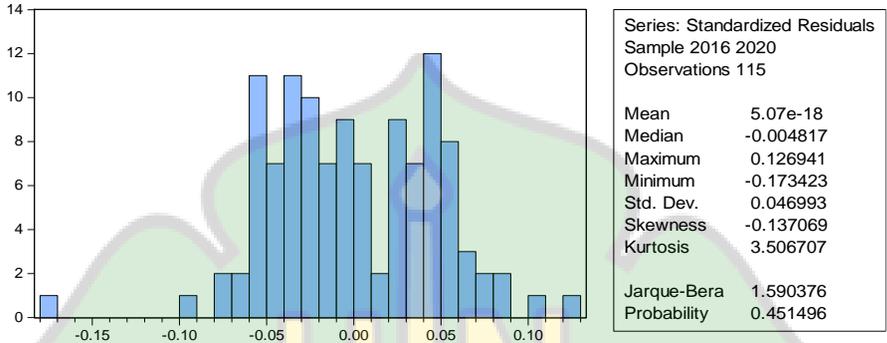
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. (2004), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Jilid 1 edisi 8. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Walpole, E.R. 2005. Pengantar Statistika edisi ketiga. Terjemahan dari *Introduction to Statistics* oleh Bambang Sumantri. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wijayanti, Ni Kadek Herni dan Bagus, Darsana, Ida. (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 4(3), h: 1164-1193.
- Wijayanti, D, P, Ratna., Noviansyah, Rizal., & Bahtiar, Sulistyan, Riza. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jawa Timur : Widya Gama
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, Wing, Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yudistira, Dama, Himawan. L, Ch, Lapian, Agnes & I.Samuel, Jacline. (2016). pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado. Volume 16 No. 03
- Zuhdi, Rifyal, Gultom (2019). Keuangan Publik Islam : Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No. 2

Zulfa, Andria. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(1), 13-22.



## Lampiran

### Lampiran 1 : Hasil Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 10 (diolah 2022)

### Lampiran 2 : Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation			
	LOG(PDRB)	LOG(BM)	LOG(ZAKAT)
LOG(PDRB)	1.000000	0.354804	0.470032
LOG(BM)	0.354804	1.000000	0.057617
LOG(ZAKAT)	0.470032	0.057617	1.000000

Sumber : Output Eviews 10 (diolah 2022)

### Lampiran 3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.214451	Prob. F(2,112)	0.3008
Obs*R-squared	2.441024	Prob. Chi-Square(2)	0.2951
Scaled explained SS	2.319747	Prob. Chi-Square(2)	0.3135

Sumber : Output Eviews 10 (diolah 2022)

#### Lampiran 4 : Hasil Regresi (3 Model)

##### Model CEM

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/30/22 Time: 14:20

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.856134		0.907017	4.251444	0.0000
LOG(BM)	0.699762		0.165035	4.240087	0.0000
LOG(ZAKAT)	0.399922		0.068753	5.816808	0.0000
R-squared	0.328689		Mean dependent var	8.326226	
Adjusted R-squared	0.316701		S.D. dependent var	0.759823	
S.E. of regression	0.628084		Akaike info criterion	1.933456	
Sum squared resid	44.18286		Schwarz criterion	2.005063	
			Hannan-Quinn		
Log likelihood	-108.1737		criter.	1.962521	
F-statistic	27.41888		Durbin-Watson stat	0.266956	
Prob(F-statistic)	0.000000				

### Model FEM

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/30/22 Time: 14:22

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

---

---

Variable	Coefficient	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.650483		0.109935	78.68749	0.0000
LOG(BM)	-0.071094		0.017654	-4.026996	0.0001
LOG(ZAKAT)	0.041374		0.021214	1.950374	0.0542

---

---

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

---

---

R-squared	0.996175	Mean dependent var	8.326226
Adjusted R-squared	0.995155	S.D. dependent var	0.759823
S.E. of regression	0.052889	Akaike info criterion	2.851598
Sum squared resid	0.251748	Schwarz criterion	2.254874
Log likelihood	188.9669	Hannan-Quinn	-
F-statistic	976.6314	Durbin-Watson stat	1.025704
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

## Lampiran 4- Lanjutan

### Model REM

Dependent Variable: LOG(PDRB)  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/24/22 Time: 14:32  
 Sample: 2016 2020  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 23  
 Total panel (balanced) observations: 115  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BM)	-0.066692		0.017629	-3.783013	0.0003
LOG(ZAKAT)	0.051531		0.020962	2.458328	0.0155
C	8.610256		0.157268	54.74892	0.0000
Effects Specification					
				S.D.	Rho
Cross-section random				0.541428	0.9905
Idiosyncratic random				0.052889	0.0095
Weighted Statistics					
R-squared	0.164046		Mean dependent var	0.363388	
Adjusted R-squared	0.149118		S.D. dependent var	0.062628	
S.E. of regression	0.057770		Sum squared resid	0.373785	
F-statistic	10.98932		Durbin-Watson stat	0.701714	
Prob(F-statistic)	0.000044				
Unweighted Statistics					
R-squared	0.028251		Mean dependent var	8.326226	
Sum squared resid	63.95640		Durbin-Watson stat	0.004101	

Sumber : Output

## Lampiran 5 : Hasil Pengujian Model

### Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: MODEL\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	713.88074 9	(22,90)	0.0000
Cross-section Chi-square	594.28123 1	22	0.0000

### Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MODEL\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.628045	2	0.0000

Sumber : Output Eviews 10 (diolah 2022)

## Lampiran 6 : Data Penelitian

Data dalam Milliar Rupiah

Kabupaten/ Kota	Tahun	PDRB	Belanja Modal	Zakat
Simeulue	2016	1.405,84	181,13	2
	2017	1.467,98	243,81	1,5
	2018	1.531,85	137,45	1,5
	2019	1.604,63	202,99	5,63
	2020	1.602,91	180,12	3
Aceh Singkil	2016	1.540,65	306,41	3
	2017	1.600,98	279,3	4,37
	2018	1.664,92	103,79	5,74
	2019	1.734,6	181,74	6,64
	2020	1.711,08	198,85	2,31
Aceh Selatan	2016	3.740,29	362,47	6,58
	2017	3.887,22	389,95	3,78
	2018	4.068,95	229,93	5,95
	2019	4.237,55	265,84	5,97
	2020	4.241,41	223,28	5,08
Aceh Tenggara	2016	3.044,88	394,68	5,7
	2017	3.197,95	364,23	4,28
	2018	3.305,44	147,85	7,79
	2019	3.442,39	229,64	9,47
	2020	3.436,34	137,6	8
Aceh Timur	2016	7.175,79	375,86	3,69
	2017	7.487,53	412,6	3,74
	2018	7.812,64	140,28	4,47
	2019	8.157,3	390,86	5,01
	2020	8.292,59	272,05	4,09

**Lampiran 6 – Lanjutan Data penelitian**

Data dalam Milliar Rupiah

<b>Kabupaten /kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Zakat</b>
Aceh Tengah	2016	5.200,04	512,06	16,72
	2017	5.410,44	411,26	15,96
	2018	5.634,36	180,83	17,81
	2019	5.818,15	278,73	15,74
	2020	5.766,45	239,03	15,67
Aceh Barat	2016	5.310,7	298,44	10,6
	2017	6.013,22	313,21	10,88
	2018	6.609,91	192,42	12,01
	2019	6.978,33	263,51	12,42
	2020	7.083,15	359,23	10,81
Aceh Besar	2016	8.858,44	398,72	17,62
	2017	9.213,4	284,53	15,54
	2018	9.590,68	256,17	17,86
	2019	10.004,04	285,17	15,6
	2020	10.008,81	299,99	12,43
Pidie	2016	6.849,96	395,19	0,32
	2017	7.152,96	307,26	0,32
	2018	7.456,46	271,09	1,08
	2019	7.785,99	304,25	0,25
	2020	7.769,64	262,39	0,57
Bireuen	2016	8.824,94	303,37	4,06
	2017	9.197,93	410,28	3,55
	2018	9.596,08	160,79	7,84
	2019	10.076,17	295,4	6,69
	2020	9.970,58	296	8,06
Aceh Utara	2016	15.195,57	375,09	11,58
	2017	15.544,94	374,75	12,85
	2018	16.343,73	223,27	13,96
	2019	16.922,86	420,69	15,15
	2020	17.015,45	424,17	15,13

**Lampiran 6- Lanjutan Data penelitian**

Data dalam Milliar Rupiah

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>Zakat</b>
Aceh Barat Daya	2016	2.623,75	377,7	2,22
	2017	2.740,78	235,33	2,29
	2018	2.867,17	172,54	2,78
	2019	3.003,11	270,58	3,05
	2020	2.987,56	248,18	3,35
Gayo Lues	2016	1.788,14	385,7	1,63
	2017	1.872,23	241,99	1,54
	2018	1.913,13	182,93	2,11
	2019	1.932,46	189,67	6,21
	2020	1.936,87	238,3	2,2
Aceh Tamiang	2016	5.279,64	347,58	7,46
	2017	5.491,01	292,2	8,58
	2018	5.727,24	177,27	6,97
	2019	5.984,5	242,63	7,65
	2020	6.009,37	276,94	8,2
Nagan Raya	2016	5.641,78	332,8	4,62
	2017	5.864,58	336,68	5,54
	2018	6.119,92	186,62	5,87
	2019	6.486,71	293,44	5,92
	2020	6.761,95	347,59	5,66
Aceh Jaya	2016	1.777	341,61	3,02
	2017	1.848,15	278,77	3,33
	2018	1.922,74	127,3	3,7
	2019	1.994,21	159,31	3,61
	2020	1.982,45	153,04	3,61
Bener Meriah	2016	3.206,52	279,07	8,12
	2017	3.337,61	245,58	8,45
	2018	3.477,01	164,51	8,55
	2019	3.627,15	189,88	9,68
	2020	3.636,17	183,21	7,86

**Lampiran 6 – Lanjutan Data penelitian**

Data dalam Milliar Rupiah

<b>Kabupaten /kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>Zakat</b>
Pidie Jaya	2016	2.259,85	302,36	2,58
	2017	2.390,84	234,17	2,35
	2018	2.502,51	178,92	2,39
	2019	2.604,59	205,02	3
	2020	2.574,73	208,97	2,73
Banda Aceh	2016	13.480,11	259,6	18,67
	2017	13.937,1	227,59	13,54
	2018	14.562,34	100,76	16,86
	2019	15.170,99	148,96	15,15
	2020	14.666,29	224,26	15,04
Sabang	2016	957,29	174,46	3,24
	2017	1.015,38	129,33	3,02
	2018	1.074,91	113,66	3,02
	2019	1.137,43	178,52	3,21
	2020	1.124,43	182,74	3,02
Langsa	2016	3.390,39	294,38	2,5
	2017	3.540,72	333,3	2,26
	2018	3.701,2	115,48	2,4
	2019	3.865,51	198,59	2,77
	2020	3.815,19	179,56	2,66
Lhokseumawe	2016	6.450,41	235,99	7,51
	2017	6.591,66	223,59	6,06
	2018	6.844,7	143,08	5,62
	2019	7.116,19	203,88	5,73
	2020	7.009,71	208,67	6,09
Subulussalam	2016	1.187,58	353,15	3,44
	2017	1.246,12	267,09	2,85
	2018	1.301,18	110,05	2,47
	2019	1.358,69	182,34	2,81
	2020	1.385,41	217,14	2,98